



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Jl. Ir. Soekarno Km.21 Jatinangor-Sumedang 45363 Telp 022-7796954 Fax 022-7794122
Surel : sekretariat.fikom@unpad.ac.id Situs Web : www.fikom.unpad.ac.id

Nomor : 1990/UN6.K.1/PK.03.02/2025 21 Februari 2025
Lampiran : -
Perihal : Seminar Usulan Riset Program Doktor (S3)
a.n. **ARIS SETIAWAN YODI/210130230010**

Yth.

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Prof. Deddy Mulyana, M.A.,Ph.D. | Ketua Sidang |
| 2. Prof. Deddy Mulyana, M.A.,Ph.D. | Ketua Tim Promotor |
| 3. Prof. Muradi, M.Si.,M.Sc.,Ph.D. | Anggota Tim Promotor |
| 4. S. Kunto Adi Wibowo, M.Comn.,Ph.D. | Anggota Tim Promotor |
| 5. Prof. Dr. Suwandi Sumartias, M.Si. | Oponen Ahli/Penguji |
| 6. Prof. Dr. Eni Maryani, M.Si. | Oponen Ahli/Penguji |
| 7. Dr. Dudi Iskandar, M.I.Kom. | Oponen Ahli/Penguji |

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menguji Seminar Usulan Riset a.n. Sdr./i **ARIS SETIAWAN YODI / 210130230010**, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Februari 2025
Pukul : 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Sidang Program S3 Ilmu Komunikasi Fikom Unpad
Gd. Pascasarjana Lt.3, Jatinangor

Rencana Judul Seminar Usulan Riset: **STUDI ANALISIS PERGESERAN WACANA JOKOWI DAN DEMOKRASI PADA MAJALAH TEMPO PERIODE 2012-2024.**

Atas perhatian dan kesediaan serta kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, kami sampaikan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Pembelajaran,
Kemahasiswaan dan Riset,

Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si.
NIP 196503271990011001

Tembusan:

1. Dekan Fikom Unpad

Bersedia untuk hadir/
Tidak bersedia untuk hadir *)

*) Coret yang tidak sesuai
**) Pakaian : Kemeja + Dasi atau PSH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Jl. Ir. Soekarno Km.21 Jatinangor-Sumedang 45363 Telp 022-7796954 Fax 022-7794122
Surel : sekretariat.fikom@unpad.ac.id Situs Web : www.fikom.unpad.ac.id

**BERITA ACARA
SEMINAR USULAN RISET (SUR)**

Pada hari ini, Rabu, 26 Februari 2025 Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran menyelenggarakan Seminar Usulan Riset (SUR) untuk mahasiswa :

Nama : ARIS SETIAWAN YODI
NPM : 210130230010
Bidang Ilmu : Ilmu Komunikasi
Judul Proposal : **STUDI ANALISIS PERGESERAN WACANA JOKOWI DAN DEMOKRASI PADA MAJALAH TEMPO PERIODE 2012-2024**

Dewan Pengaji :

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| • Prof. Deddy Mulyana, M.A.,Ph.D. | Ketua Sidang |
| • Prof. Deddy Mulyana, M.A.,Ph.D. | Promotor |
| • Prof. Muradi, M.Si.,M.Sc.,Ph.D. | Co Promotor I |
| • S. Kunto Adi Wibowo, M.Comn.,Ph.D. | Co Promotor II |
| • Prof.Dr. Suwandi Sumartias, M.Si. | Pengaji I |
| • Prof.Dr. Eni Maryani, M.Si. | Pengaji II |
| • Dr. Dudi Iskandar, M.I.Kom. | Pengaji III |

Berdasarkan nilai hasil ujian Seminar Usulan Riset tersebut, Dewan Pengaji menyatakan Saudara Aris Setiawan Yodi **LULUS** dengan nilai A.

Jatinangor 26 Februari 2025
Ketua Sidang,

Prof. Deddy Mulyana, M.A.,Ph.D.
NIP. 195801281982031002

USULAN PENELITIAN DISERTASI

**STUDI ANALISIS PERGESERAN WACANA JOKOWI DAN
DEMOKRASI PADA MAJALAH TEMPO PERIODE 2012 - 2024**



ARIS SETIAWAN YODI / 210130230010

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PADJAJARAN**

2024

Lembar Pengesahan

DAFTAR ISI**DAFTAR GAMBAR DAN TABEL**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jika dianalisis lebih mendalam, wacana kepemimpinan politik seorang Presiden di Indonesia tidak lepas dari cerita tentang simbol. Simbol yang memungkinkan seorang pemimpin dianggap layak dan tepat menjadi pemimpin oleh rakyat Indonesia. Clifford Geertz (1973) dalam *The Interpretation of Cultures* menjelaskan bahwa politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh relasi patron-client dan penggunaan simbol-simbol kekuasaan. Pemimpin sering kali membangun legitimasi melalui simbol-simbol yang dekat dengan rakyat, tetapi relasi kekuasaan yang sebenarnya bersifat transaksional dan pragmatis. Pada konteks Indonesia, simbol kepemimpinan raja jawa dalam filosofi kepemimpinan Jawa sangat lekat dengan rakyat Indonesia, khususnya dalam melihat citra seorang pemimpin, jika seorang tokoh politik memiliki asosiasi yang kuat dengan raja Jawa yang baik, maka rakyat cenderung memberikan dukungan atau legitimasi kepada tokoh tersebut. Hal itu karena pilihan sikap, langkah, dan pemikiran, serta kebijaksanaan yang diambil seorang pemimpin sangat menentukan kehidupan bangsa Indonesia, hal itu disebabkan masih kuatnya pola patron-klien dalam masyarakat Indonesia (Kristianto, 2021). Rakyat atau kawula sering kali mengamini dan mengikuti saja pilihan dan langkah pemimpinnya pada nyaris semua tingkatan di masyarakat. Di Indonesia, pemimpin masih menjadi acuan bagi warganya. Pemimpin dianggap sebagai teladan. (Kristanto, 2021).

Simbol Raja Jawa memiliki akar yang mendalam pada budaya feodal Jawa sejak era kerajaan-kesultanan di Nusantara. Feodalisme adalah sistem politik dan sosial yang berkembang di Eropa abad pertengahan, dengan bentuk susunan hierarki yang melibatkan hubungan patron (pemimpin) - klien (yang dipimpin) yang dalam konteks Indonesia hal itu lekat dengan masa

kerajaan-kerajaan di Nusantara, di mana kekuasaan terpusat pada keputusan raja sebagai perwakilan dewa dan rakyat harus menaatiannya secara penuh (Khair, 2025). Meskipun Indonesia mengadopsi sistem demokrasi, elemen-elemen feodalisme masih terlihat dalam perpolitikan Indonesia. (Khair, 2025)

Kristianto, 2021 menjelaskan dalam konsep raja atau sultan di Jawa, dia adalah wakil Tuhan, sehingga ia yang harus menggerakan kehidupan masyarakatnya. Hal ini tergambar dalam gelar seorang raja atau sultan di Jawa, yang adalah Senopati ing Ngalaga, Ngabdurahman, Sayidin Panata Gama, Kalifatullah ingkang Kaping..ing Tanah Jawa, dan lain-lain. Kepribadian dan karakter pemimpin harus mampu menjadi panglima di medan perang : turun dan bekerja bersama rakyat secara langsung, orang baik, penata agama (semua), dan wakil Allah. Secara lebih spesifik, dalam konsep kekuasaan Jawa : Mandala, atau pemimpin adalah pusat energi yang menggerakan sekitarnya, termasuk rakyat untuk menjadi apa pun, atau melakukan apa saja, termasuk untuk bergerak maju bersama. (Kristanto, 2021).

Simbolisasi Raja Jawa bisa dilihat dari beberapa figur presiden Indonesia yang memimpin dengan durasi cukup lama, setidaknya lebih dari lima tahun (1 periode kepemimpinan presiden). Presiden RI pertama, yakni Soekarno misalnya bisa kita pahami disimbolisasikan sebagai pemimpin atau raja jawa yang memandu dan memimpin rakyat Indonesia untuk keluar dari era penjajahan kolonial. Soekarno bahkan menjuluki dirinya sebagai "penyambung lidah rakyat". Soekarno sangat mencintai seni pertunjukan wayang kulit, seni pertunjukan yang berasal dari seni-budaya Hindu India yang di Indonesia kerap dipadukan dengan cerita kepemimpinan dan kehidupan rakyat Indonesia. Nilai-nilai dalam cerita wayang yang mengajarkan yang baik akan selalu mengalahkan yang jahat juga dinilai mempengaruhi gaya kepemimpinan Soekarno. Wayang dianggap sebagai sumber informasi tentang konsep hubungan kawula-gusti. Wayang yang sejak

lama sudah menjadi hiburan yang diselenggarakan oleh pihak istana kerajaan juga menjadi pelajaran bagi semuanya karena dalam cerita wayang digambarkan berbagai macam aspek perilaku manusia, mulai dari ketamakan, budi luhur, kelemahan kecil manusia, keperkasaan dewa, hingga berlakunya takdir yang tidak dapat ditawar-tawar (Moertono, 1985). Wayang sesungguhnya mencerminkan cita-cita dan hasrat masyarakat Jawa mengenai hubungan kawula-gusti yang ideal. (Moertono, 1985)

Tidak hanya itu, Pancasila yang dijadikan falsasah atau landasan negara Indonesia pun diambil Soekarno dari bahasa Jawa atau Sanksekerta. Lebih dari itu, Soekarno sering kali dipersonifikasikan seperti Satria Pandawa atau Permadi, yang itu adalah "lelananging jagad". Sebagai pria sejati, Soekarno selalu ingin mengayomi semua orang, semua warga Indonesia, meskipun sebagian di antaranya justru mengancam dan merugikannya. (Kristanto, 2021). Puncak simbolisasi Soekarno sebagai raja, yakni pada 1963 hasil sidang umum kedua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yaitu mengangkat Presiden Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi Indonesia dan Presiden seumur hidup. Selanjutnya, pada penutupan sidang umum MPRS 1966 Soekarno berpidato menolak ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, bahkan menolak dijadikan dan diperlakukan layaknya raja (Saputra, 2018). Meskipun Soekarno menolak anggapan dia sebagai raja, simbolisasi dirinya sebagai pemimpin dan raja yang memimpin Indonesai pada saat itu tidak bisa dihindarkan.

Presiden ke-2 RI Soeharto yang memimpin Indonesia selama 32 tahun juga sangat lekat dalam simbolisasi raja jawa. Selama rezim Orde Baru (Orba) yang dipimpin Soeharto, ia disebut berkuasa layaknya raja Jawa (Sitompul, 2024). Kecenderungan yang dinilai mulai dirasakan setelah memasuki dua dekade kepemimpinan Soeharto, di mana saat itu Soeharto menjalankan pemerintahan sangat terpusat di bawah kendalinya. Melalui pendekatan keamanan, kepemimpinan

Soeharto kadang pula bersikap represif bagi opisisi yang bersuara kritis kepada pemerintah. (Sitompul, 2024). Pengakuan Soeharto sebagai raja bahkan diceritakan sendiri olehistrinya, Tien Soeharto, yang dalam suatu perjalanan ke luar negeri pernah bercerita kepada Marzuki Arifin, wartawan bahwa "Bapak itu sebenarnya Raja, tapi sekarang istilah Raja tidak dipakai lagi. Yang dipakai Presiden saja.". (Sitompul, 2024). Simbolisasi Soeharto sebagai raja juga bisa dipahami dari pernyataan Jusuf Wanandi, pendiri lembaga think thank pada era Orba bahwa Soeharto mengidentifikasi dirinya sebagai penerima wahyu untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan rezim Orde Lama. Karena itu, dia akan terus memerintah selama wahyu masih ada. Dengan demikian, Soeharto tidak bersedia lengser begitu saja. Sebagaimana mitos Kerajaan Mataram yang diyakini, Soeharto mengatakan, selama wahyu masih melekat, maka kekuasaan dalam genggaman. (Sitompul, 2024).

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menggunakan simbolisasi Raja Jawa dalam dirinya dan keluarganya dengan tujuan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat bahwa dirinya adalah sosok pemimpin. (Cahyono dalam bbc.com, 2018). Simbolisasi itu bahkan disampaikan langsung oleh SBY pada 2018 dihadapan kader Partai Demokrat, di mana SBY menyampaikan bahwa Agus Harimurti dan Edi Baskoro, kedua anaknya adalah trah ke-14 Kerajaan Majapahit. Saat itu, bahkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyebarkan di platform media sosial gambar silsilah yang menyebut SBY memiliki garis keturunan dengan Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Tidak hanya itu, SBY juga digambarkan keturunan Raja Mataram. Simbolisasi bahwa SBY dan keluarganya memiliki garis keturunan kerajaan Majapahit dan Mataram juga diwujudkan dalam penamaan cucu SBY mulai dari Almira Tungga Dewi Yudhoyono, Airlangga Satriadhi Yudhoyono, Pancasakti Maharajasa Yudhoyono, hingga Gayatri Idalia Yudhoyono. (bbc.com, 2018)

Simbolisasi Raja Jawa yang akhir-akhir ini terlihat jelas juga dilekatkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Selain pernyataan Jokowi sebagai raja Jawa secara tidak langsung atau tersirat disampaikan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam pidatonya saat terpilih menjadi Ketua Umum Golkar pada Agustus 2024, di mana ia menyatakan "jangan main-main dengan raja Jawa, bisa celaka kita" (Nugroho, 2024) simbolisasi Jokowi sebagai raja Jawa juga dilakukan oleh Jokowi sendiri dan juga oleh media nasional. Jokowi dengan sendirinya pada 2023, saat perayaan upacara HUT RI di Istana Negara, untuk pertama kalinya mengenakan pakaian raja Mataram (Amangkurat) secara lengkap dan menunjukkan dengan jelas simbolisasi Raja Jawa kepada khalayak. (Choir, 2023). Majalah Tempo pada edisi 26 Agustus - 1 September 2024 bahkan menerbitkan majalah dengan cover wajah Jokowi yang terlihat sebagai Raja Jawa dalam sebuah kartu, persis seperti Majalah Tempo menerbitkan majalah pada edisi 1998 di mana cover wajah Soeharto juga terlihat sebagai raja dalam sebuah kartu. Isi laporan utama Tempo pada edisi September 2024, yaitu jelas mengindikasikan bahwa Jokowi berlaku seperti raja yang ingin melanggengkan dinasti kekuasaannya, meskipun nantinya sudah tidak berkuasa setelah 20 Oktober 2024. Cara melanggengkan dinasti kekuasaannya dilakukan dengan cara mengubah-ubah konstitusi. (Tempo, 2024).

Simbolisasi kepemimpinan seorang presiden tidak pernah bisa lepas, bahkan dalam sistem politik modern yang sangat demokratis sekalipun. Jika merujuk pada Amerika Serikat, salah satu negara yang dianggap oleh para akademisi sebagai negara demokrasi tertua di dunia, simbolisasi terhadap pemimpinnya agar mendapatkan legitimasi dari rakyatnya pun sangat kuat dilakukan secara turun-temurun bahkan disesuaikan dengan konsep demokrasi. Simbolisme dalam kepresidenan Amerika Serikat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap otoritas dan stabilitas negara. Binkley (1952) menekankan bahwa jabatan

presiden tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai simbol negara yang mewakili kesatuan dan identitas nasional. Konsep ini berakar pada tradisi monarki, dengan elemen-elemen simbolis seperti upacara pelantikan, penghormatan kepada presiden, dan seremonial publik yang menggambarkan presiden sebagai figur yang memegang otoritas tertinggi dalam negara (Binkley, 1952). Simbolisme ini, meskipun dikaitkan dengan monarki, telah disesuaikan dengan kondisi demokratis Amerika Serikat, sehingga menciptakan gambaran kepemimpinan yang tidak hanya politik tetapi juga representasi dari seluruh rakyat Amerika.

Binkley (1952) lebih lanjut menjelaskan bahwa simbolisme kepresidenan semakin meluas dengan terpilihnya presiden yang mampu memobilisasi seluruh bangsa. Roosevelt, misalnya, dengan pidatonya yang terkenal "the only thing we have to fear is fear itself," mampu mengubah citra kepresidenan menjadi simbol harapan dan kekuatan negara di tengah Depresi Besar. Ini menggambarkan bagaimana presiden dapat menggunakan simbolisme untuk menghubungkan kebijakan dan tindakan pemerintah dengan kebutuhan emosional masyarakat. Dalam hal ini, presiden bukan hanya pemimpin politik tetapi juga simbol penting dalam menjaga kohesi nasional.

Simbolisme presiden juga muncul dalam hubungan antara keluarga presiden dan masyarakat. Sejak era Theodore Roosevelt, keluarga presiden menjadi bagian integral dari simbolisme tersebut. Binkley (1952) menyoroti bagaimana tindakan-tindakan kecil keluarga presiden, seperti anak-anak Roosevelt yang bermain di sekitar Gedung Putih, turut memperkuat gambaran presiden sebagai figur keluarga yang dapat diakses dan sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, simbolisme kepresidenan menjadi lebih manusiawi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari rakyat Amerika, mengingatkan mereka bahwa presiden adalah bagian dari mereka.

Sementara itu, simbolisasi dalam bentuk lain juga dilakukan oleh Presiden AS John F. Kennedy, Meagher (1997) mengamati bahwa Kennedy menggunakan simbolisme ketakutan sebagai alat untuk memobilisasi opini publik di dalam negeri. Sebagai contoh, dalam pernyataannya mengenai missile gap pada tahun 1960, Kennedy menggambarkan ketertinggalan militer Amerika dibandingkan dengan Uni Soviet sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan tindakan segera. Dengan menggunakan bahasa yang apokaliptik dan menekankan bahaya yang mengancam kebebasan, Kennedy tidak hanya mencoba membangkitkan rasa takut, tetapi juga untuk mendorong reformasi besar dalam kebijakan pertahanan Amerika. Hal ini juga mencerminkan cara Kennedy menggunakan krisis untuk memperkuat posisi politiknya dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung kebijakan yang tegas dan sering kali kontroversial. Seperti yang dicatat oleh Meagher (1997), pandangan dunia Kennedy sangat dipengaruhi oleh teori-teori politik yang ia pelajari di Harvard, dan simbolisme ini menjadi alat utama dalam kepemimpinannya. Dalam banyak hal, Kennedy menggunakan simbolisme ketakutan dan keberanian untuk mempersiapkan negara menghadapi krisis yang lebih besar, sekaligus membentuk identitas nasional yang dipimpin oleh nilai-nilai demokrasi yang kuat.

Adapun, Presiden AS lainnya, Ronald Reagan secara konsisten menggunakan simbolisasi mitos untuk memperkuat legitimasinya di hadapan masyarakat Amerika. Reagan menggunakan mitos untuk memperkuat identitas politiknya, yang tercermin dalam retorika dan kebijakannya. Dalam banyak pidatonya, termasuk pidato pelantikannya, Reagan menekankan pentingnya "*shining city on a hill*," sebuah metafora yang dipinjam dari John Winthrop, yang mencerminkan cita-cita Amerika sebagai negara yang memiliki misi khusus dalam dunia. Johnson (2009) menyoroti bagaimana Reagan mengadopsi mitos ini untuk menggambarkan Amerika sebagai

negara yang memiliki takdir untuk memimpin dunia, terutama dalam menghadapi ancaman dari komunisme dan totalitarianisme.

Sebagai seorang tokoh yang berasal dari Hollywood, Reagan menggabungkan simbolisme dan retorika dari dunia film dengan kebijakannya sebagai presiden. Johnson (2009) mengidentifikasi bahwa gaya komunikasi Reagan sangat dipengaruhi oleh pengalaman filmnya, yang mengarah pada penciptaan citra dirinya yang kuat sebagai pahlawan nasional. Citra ini dipertahankan dan dipromosikan melalui berbagai cara, termasuk melalui pustaka dan museum kepresidenannya. Bahkan biografi tentang Reagan, baik yang ditulis oleh penulis resmi maupun biografi yang lebih bersifat pribadi, sering kali menggunakan elemen-elemen mitos untuk menggambarkan kehidupannya. Mitos ini menggabungkan kisah pribadi dengan narasi nasional yang lebih besar, sehingga menciptakan kisah tentang Reagan sebagai tokoh yang tidak hanya penting dalam konteks politik, tetapi juga dalam budaya Amerika yang lebih luas.

Dalam konteks Indonesia beberapa tahun terakhir, peneliti melihat simbolisasi Jokowi sebagai pemimpin yang tepat untuk memimpin rakyat Indonesia atau bisa disederhanakan sebagai raja yang tepat bagi rakyat Indonesia dilakukan oleh beberapa media, salah satunya yang paling jelas Majalah Tempo. Simbolisasi tersebut setidaknya terjadi pada awal kemunculan Jokowi di panggung politik nasional mulai dari tahun 2012 - 2014. Menariknya, simbolisasi tersebut bergeser dan berubah menjadi Jokowi berperan sebagai Raja Jawa yang jahat karena mencerabut atau merusak nilai-nilai demokratis di masa akhir kepemimpinan Jokowi (2020 - 2024). Peneliti melihat Majalah Tempo memainkan peran besar dalam menciptakan simbol Jokowi sebagai pemimpin yang baik dan tepat untuk memimpin rakyat Indonesia pada awal masa kemunculannya sekaligus menciptakan simbol Jokowi sebagai Raja Jawa jahat atau bahkan diktator yang merusak sendi-sendi kehidupan demokratis masyarakat Indonesia.

Salah satu potret bagaimana Majalah Tempo coba memproduksi wacana Jokowi sebagai pemimpin yang baik yaitu saat memberitakan kemenangan Jokowi pada Pilkada Jakarta tahun 2012. Dalam editorialnya, kemenangan Jokowi dianggap sebagai kemenangan demokrasi. Jokowi juga dianggap akan memimpin Jakarta dengan lebih humanis seperti rekam jejaknya saat memimpin Solo (Tempo, 2012). Tempo bahkan menampilkan wajah Jokowi dengan senyum dengan tagar #Jokowinner pada halaman depan (cover) Majalah Tempo. Majalah Tempo terlihat tengah menciptakan simbol bahwa Jokowi adalah salah satu pemimpin yang muncul dalam panggung politik nasional dari rahim demokrasi Indonesia yang baru saja memenangi kontestasi di Ibu Kota RI. Salah satu judul dari laporannya pada edisi itu bahkan diberi judul "**Ojo Lali, Janji Iku Utang**" (Tempo, 2012) judul yang diambil berdasarkan pesan ibunda Jokowi saat memenangi Pilkada Jakarta ke Jokowi. Jokowi disimbolkan sebagai pemimpin yang berasal dari Jawa yang patuh terhadap ibundanya yang menginginkan Jokowi menjadi pemimpin yang menepati janji. Sebuah simbolisasi yang membentuk pandangan bahwa Jokowi adalah seorang pemimpin Jawa yang memang sesuai dan dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat itu.



Wacana yang diproduksi Majalah Tempo bahwa Jokowi merupakan salah satu pemimpin baik yang tepat untuk memimpin Jakarta pada tahun 2012 juga dilakukan oleh media yang lainnya.

Media [bbc.com](#), (2023) bahkan menuliskan Jokowi selama menjabat Gubernur DKI Jakarta (2012-2014) menjadi kesayangan media karena seringkali disebut keberhasilannya melakukan reformasi birokrasi, mengambil saham PT Palyja dari perusahaan asing, pemberahan Pasar Tanah Abang, relokasi warga dan perbaikan Waduk Pluit hingga pembangunan rumah Kampung deret untuk rakyat. Wajah Jokowi juga dijadikan sampul Majalah terkemuka AS Time dengan judul utama 'A New Hope' atau harapan baru, hingga beberapa media asing yang memberi julukan Jokowi sebagai Obama dari Jakarta hingga Mr. Fix atau pemimpin yang bisa memperbaiki semua hal. ([bbc.com](#), 2023)

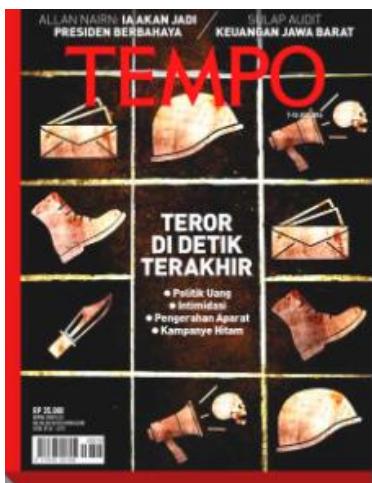
Selanjutnya, saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Majalah Tempo memproduksi wacana bahwa Jokowi merupakan sosok pemimpin pekerja keras yang tanpa lelah turun langsung blusukan ke masyarakat. Bahkan, salah satu berita utama pada edisi Majalah Tempo 20 Januari 2013 dengan judul "Soal Jalan Tol, Saya Ndak Bisa Apa-Apa" memuat kalimat utama yang pada intinya menunjukkan bahwa Jokowi dihadapkan masalah yang terlalu kompleks di Jakarta, namun Jokowi adalah pemimpin baik yang tanpa lelah bekerja untuk warga Jakarta dengan blusukan setiap hari ke kampung-kampung. (Tempo, 2013) Majalah Tempo juga memproduksi simbol bahwa Jokowi adalah pemimpin sederhana yang mau turun langsung ke masyarakat dengan produksi halaman sampul edisi tersebut di mana Jokowi hanya berbaju putih sederhana di tempat yang kanan kirinya berlumpur.



Wacana Jokowi sebagai pemimpin yang dinilai paling baik memimpin Indonesia cenderung semakin diproduksi oleh Majalah Tempo menjelang Pemilu Presiden tahun 2014. Beberapa edisi Majalah Tempo pada akhir tahun 2013 dan awal 2014 seolah mensimbolkan kepada publik bahwa Jokowi adalah sosok yang diinginkan oleh publik menjadi presiden berdasarkan hasil survei. Pada edisi Majalah Tempo Agustus 2013 misalnya, halaman sampulnya berjudul "Mendadak Jokowi" dengan judul berita di Laporan Utama yaitu "Tiga Elemen Pendongkrak Jokowi". (Tempo, 2013). Bahkan, pada Januari 2014 Laporan Utama Majalah Tempo diberi judul "Sudah waktunya PDIP Memerintah!" dengan halaman sampul majalah menampilkan dua sosok yaitu Jokowi dan Megawati Soekarnoputri. Megawati sebagai Ketua Umum PDIP yang memiliki kewenangan untuk mencalonkan capres didorong oleh Tempo untuk menjadikan Jokowi sebagai capres yang dituliskan merajai survei calon presiden dan mampu juga melejitkan suara PDIP di Pemilu 2014. (Tempo, 2014)

Saat Jokowi sudah resmi dicalonkan sebagai presiden oleh PDIP, Majalah Tempo dalam pemberitaannya cenderung mengawal proses Jokowi mencari calon wakil presiden dan teman koalisi dengan judul berita "Saya Sudah Diberi Mandat 100 persen", hingga Majalah Tempo yang

memberitakan bahwa pasangan Jokowi-JK yang selama kampanye diserang oleh fitnah atau kampanye gelap, seperti beberapa edisi Majalah Tempo yang menerbitkan halaman sampul "Obor Rakyat" hingga halaman sampul bergambar amplop, sepatu, dan pisau menyerupai pakaian dinas suatu institusi tertentu yang turut mengintervensi Pilpres khususnya melawan Jokowi. (Tempo, 2014)



Pada edisi Majalah Tempo 14 Juli 2014, Majalah Tempo memproduksi wacana Jokowi memenangkan Pilpres 2014 versi hitung cepat lembaga survei yang kredibel. Hal itu bertepatan dengan saat itu calon presiden lainnya, Prabowo Subianto yang juga mengklaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat tim internalnya. Majalah Tempo mensimbolkan Jokowi menang dengan produksi halaman sampul besar foto Jokowi yang digendong oleh banyak orang di bawahnya dengan kata "JOKOWI!", sebuah simbol yang menunjukkan ke publik bahwa Jokowi yang memenangkan Pilpres dan semua saksi dan masyarakat harus turut mengawal kemenangan Jokowi. (Tempo, 2014)

Majalah Tempo yang cenderung terlihat memproduksi wacana bahwa Jokowi sebagai pemimpin yang patut dan pantas didukung pada Pilpres 2014 sejalan dengan banyak pihak yang menilai bahwa mendukung Jokowi adalah mendukung nilai demokrasi. Hal itu misalnya

disebabkan ada wacana yang terbangun bahwa Pilpres 2014 adalah pertarungan antara kepemimpinan rakyat dan kekuatan Orde Baru, Prabowo dianggap produk murni dari otoritarianisme Orde Baru yang menjadi kaya dari usaha perburuan rente ekonomi, misalnya dari kayu dan sumber daya alam, Prabowo diberhentikan dari militer karena menculik aktivis demokrasi. (Anugrah, 2014).

Oleh karena itu, kemenangan Jokowi di Pilpres 2014 digambarkan sebagai kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi, dan simbol perlawanan terhadap oligarki yang masih mendominasi politik Indonesia (bbc.com, 2023). Sahide dalam Kompas (2023) misalnya menuliskan bahwa pada 2014, banyak kalangan menilai bahwa terpilihnya Jokowi dan Jusuf Kalla pada pilpres saat itu sebagai salah satu indikator demokrasi Indonesia semakin sehat dan sempurna. Menurut Sahide (2023), kesempurnaan tersebut dilihat dari terpilihnya Jokowi sebagai presiden adalah hal pertama kali di Indonesia karena Jokowi adalah presiden pertama yang terpilih dari figur yang bukan ketua umum parpol atau elite parpol. Sahide (2023) menyebut, Jokowi hanyalah kader biasa dari PDIP, dan sebelum Jokowi muncul, semua presiden Indonesia adalah pimpinan puncak dari parpol yang mengusungnya. Indikator lain menurut Sahide (2023), yaitu Jokowi adalah presiden pertama yang memimpin negeri dari kalangan pinggiran, sehingga membuka wawasan kepada publik demokrasi adalah jalan bagi semua orang yang ingin menjadi pemimpin dan itu adalah substansi dari demokrasi di mana rakyat berdaulat untuk menemukan orang-orang terbaik yang akan memimpin mereka.

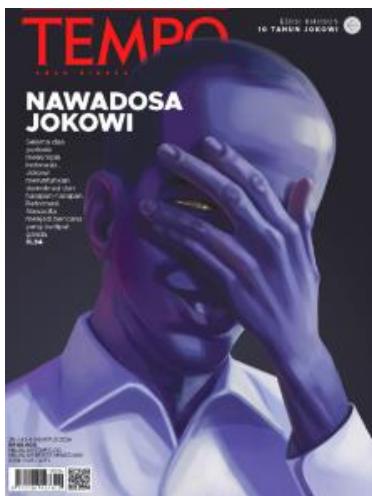
Namun demikian, pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014 oleh kalangan akademisi tidak saja dilihat sebagai simbol kemenangan demokrasi, seperti yang dikemukakan oleh Mietzner (2015) bahwa terdapat dua perspektif utama dalam pencalonan Jokowi 2014 yaitu teori pluralis yang melihat Jokowi sebagai agen reformasi dalam politik Indonesia dan juga teori oligarki di

mana Jokowi adalah alat dari elit lama yang memanfaatkan popularitasnya untuk mempertahankan kekuasaan. Artinya, perdebatan wacana Jokowi dalam nilai demokrasi saat itu juga telah bergulir, terlepas dari banyak media, khususnya Majalah Tempo yang memproduksi simbol atau wacana bahwa Jokowi sebagai sosok yang patut didukung oleh rakyat Indonesia saat itu.

Seiring berjalananya waktu, wacana publik tentang Jokowi yang diproduksi oleh media mulai mengalami pergeseran. Jika pada awal kemunculannya Jokowi dipandang sebagai simbol harapan demokrasi, maka dalam perjalannya muncul kritik terhadap berbagai kebijakan dan langkah politiknya, khususnya terkait tuduhan politik dinasti menjelang masa purnabaktinya sebagai presiden Indonesia. (bbc.com, 2023) Majalah Tempo juga memainkan peran yang cukup signifikan ketika mulai mempertanyakan proyek infrastruktur yang agresif, revisi UU KPK, hingga munculnya dugaan politik dinasti. Majalah Tempo bahkan sebagai media yang terbilang sangat berani menyimbolkan Jokowi sebagai Pinokio, tokoh fiksi yang berperan sebagai pembohong pada halaman sampulnya di edisi September 2019, karena Jokowi dinilai melakukan upaya pelemahan KPK dan itu tidak sesuai dengan nilai demokrasi. (Tempo, 2019). Majalah Tempo bahkan pada edisi 13 Juni 2020 menerbitkan majalah dengan halaman sampul Jokowi mengenakan pakaian raja Jawa menaiki kuda diikuti anak sulungnya Gibran dan menantunya Bobby Nasution mengenakan pakaian yang sama dengan judul "Panggung Politik Trah Jokowi" (Tempo, 2020). Pada edisi itu, Majalah Tempo memberitakan bahwa Jokowi melakukan lobi politik ke partai-partai politik agar anak dan menantunya bisa berlaga di Pilkada serentak 2020. (Tempo, 2020).

Puncaknya, pada 2024, Majalah Tempo terlihat sangat berubah dalam memproduksi wacana tentang Jokowi dengan menyimbolkan Jokowi sebagai tokoh "jahat" yang dinilai merusak demokrasi di Indonesia. Pada 28 Juli 2024, Majalah Tempo menampilkan halaman sampul majalahnya dengan wajah jokowi yang tersenyum di tengah kegelapan dengan judul "Nawadosa

Jokowi" Nawadosa (9 dosa) sendiri cenderung diadopsi dari visi-misi Jokowi saat maju sebagai capres yaitu nawacita (9 cita-cita atau visi-misi). (Tempo, 2024) Dalam edisi Nawadosa Jokowi tersebut dijelaskan bagaimana pada era pemerintahannya, Jokowi yang lahir dari demokrasi justru merusak nilai demokrasi mulai dari mengembalikan kekuasaan militer pada jabatan sipil, hingga melanggengkan praktik politik dinasti di mana Jokowi dinilai menghendaki perubahan aturan UUD syarat pencapresan untuk membuka jalan bagi anaknya yang belum memenuhi syarat umur menjadi wapres. (Tempo, 2024)



Berubahnya simbolisasi terhadap Jokowi yang dilakukan oleh Majalah Tempo pada awal kemunculannya di panggung nasional hingga saat akhir masa kepemimpinannya sebagai presiden dapat dilihat dari beberapa hal. Salah satunya, yaitu karakter politik Indonesia yang memang cenderung sangat dinamis atau sulit diprediksi. Mulyana (2013:1) menyatakan, "Politik paling aneh, paling absurd, paling unik, dan sekaligus paling sulit diramalkan adalah politik di Indonesia." Ulil (2024) bahkan menyebut situasi politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini bersifat *fluid* atau cair, di mana perubahan bisa terjadi setiap saat. Ulil (2024) menjelaskan kemencairan politik terjadi di semua aspek dan tingkatan politik di Indonesia baik di level aktor politik, maupun masyarakat sebagai pemilih. Ulil (2024) mencontohkan berubahnya sejumlah partai dan kalangan

yang sebelumnya "anti" terhadap Prabowo menjadi sangat "pro", begitu pun kalangan yang sangat "memuja" Jokowi sekarang tiba-tiba menjauh dan bahkan sangat antipati terhadapnya. Di mata pendukungnya, Jokowi yang semula dipandang sebagai "hero" berubah menjadi "zero", bahkan sasaran kritik yang amat keras. (Ulil, 2024).

Tidak hanya itu, situasi politik Indonesia yang sangat cair (Ulil, 2024) memungkinkan munculnya figur pemimpin dengan citra yang terus berubah, seiring dengan perubahan realitas politik dan sosial. Beberapa figur tersebut misalnya bisa kita pahami dari beberapa contoh fenomena yang terjadi, seperti Ali Mochtar Ngabalin, sosok yang pada tahun 2014 menjadi salah satu juru bicara Prabowo - Hatta Radjasa di Pilpres yang bahkan sempat dilaporkan oleh Tim Hukum Paslon Jokowi - Jusuf Kalla karena dinilai melakukan kampanye hitam dan negatif. Bahkan, Ngabalin pernah berkampanye bahwa Jokowi kerempeng dan dianggap oleh banyak pihak tak pantas seorang juru bicara berkampanye seperti itu. Akan tetapi, pada 2018 Ngabalin diangkat menjadi Tenaga Ahli Presiden Jokowi dan menjadi salah satu juru bicara Presiden Jokowi. (cnnindonesia.com, 2018) Sejak saat itu, Ngabalin bahkan dengan sangat keras dan terdepan membela Jokowi dari para pengkritiknya.

Sosok lain misalnya, seperti Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dipanggil Ahok. Sebelum menjadi kader Gerindra yang kemudian dicalonkan menjadi cawagub DKI Jakarta pada 2012 mendampingi Jokowi, ia adalah kader Golkar dan sempat menduduki bangku parlemen. Setelah menjadi Wakil Gubernur Jakarta, Ahok yang gagal saat mencalonkan diri sebagai cagub DKI Jakarta 2017, pada perkembangannya ia kemudian menjadi kader PDI Perjuangan pada 2019 hingga saat ini. (kumparan.com, 2019). Menantu Jokowi, Bobby Nasution yang merupakan kader PDI Perjuangan pada 2020 saat maju sebagai Calon Walikota Medan, saat ini menjadi kader Partai Gerindra saat maju sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara. (detik.com, 2024) Adapun, Figur

Prabowo dalam konteks hubungannya dengan Jokowi pun menunjukkan relasi yang sangat cair. Prabowo menjadi pendukung utama Jokowi saat maju di Pilkada Jakarta 2012, kemudian menjadi lawannya pada Pilpres 2014 dan 2019, kemudian Prabowo menjadi menteri Jokowi periode 2019-2024 yang pada akhirnya Jokowi menjadi pendukung utama Prabowo di Pilpres 2024. (tempo.co, 2024)

Tidak hanya figur tokoh politik yang sangat cair dalam menentukan sikap politiknya, bahkan institusi partai politik pun bisa sangat kontras diberitakan dalam penyikapan politiknya. Salah satu partai seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang pada 2019 mempublikasikan bahwa Capres Prabowo mendapatkan penghargaan “Kebohongan Terlebay”, pada 2024 PSI justru mendukung Prabowo sebagai calon presiden. (tempo.co, 2024)

Fenomena-fenomena tersebut menjadi semakin kompleks ketika media ikut membentuk dan memperkuat wacana perubahan dan pergeseran sikap terhadap suatu figur atau institusi politik di Indonesia. Majalah Tempo, sebagai salah satu media utama di Indonesia, menjadi aktor penting yang merefleksikan dinamika politik melalui perubahan sikap editorialnya terhadap Jokowi. Narasi dan simbolisasi yang dibangun oleh Tempo dapat menunjukkan bagaimana media beradaptasi dengan perkembangan situasi politik, serta bagaimana media memainkan peran kontrol sosial dalam menjaga prinsip demokrasi.

Clifford Geertz (1973) dalam *The Interpretation of Cultures* menjelaskan bahwa politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh relasi patron-client dan penggunaan simbol-simbol kekuasaan. Menurut Geertz (1973) pemimpin sering kali membangun legitimasi melalui simbol-simbol yang dekat dengan rakyat, tetapi relasi kekuasaan yang sebenarnya bersifat transaksional dan pragmatis. Dalam konteks Majalah Tempo, simbolisasi Jokowi sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat digambarkan dengan sampul majalah Tempo yang menunjukkan Jokowi mengenakan pakaian

kemeja putih sederhana (Tempo, 2013), kemeja yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, dan Jokowi yang dituliskan tanpa lelah turun langsung ke masyarakat (Tempo, 2013). Majalah Tempo menggambarkan Jokowi dekat dengan rakyat, namun di saat yang bersamaan realitas politik yang tidak bisa dipungkiri ialah Jokowi adalah politisi yang memerlukan suara rakyat dalam pertarungan elektoral, baik itu di Pilkada Jakarta ataupun Pilpres.

Sementara itu, Benedict Anderson (1990) dalam *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia* menegaskan bahwa komunikasi politik di Indonesia sering kali bersifat berlapis makna. Bahasa simbolis digunakan untuk membangun citra pemimpin dan menavigasi relasi kekuasaan yang kompleks. Dalam konteks ini, bahasa simbolis yang digunakan Majalah Tempo untuk membangun citra Jokowi sebagai sosok pemimpin yang pekerja keras terlihat dari judul halaman sampul dan laporan utamanya seperti "Kerja, Kerja, Kerja" (Tempo, 2014), ataupun Jokowi sebagai pemimpin bersih yang tidak tahu adanya praktik korupsi yang dilakukan jajarannya saat memerintah, seperti "Awas Jokowi" (Tempo, 2014) saat Tempo membahas dugaan permainan praktik pengadaan bus Transjakarta senilai Rp 1,086 T, hingga bahasa simbol "Sudah Waktunya PDIP Memerintah" sebagai judul Laporan Utama Tempo untuk menjelaskan PDIP akan menang jika mencalonkan Jokowi sebagai capres pada 2014 di mana saat itu terdapat relasi kekuasaan yang kompleks antara Megawati, Ketua Umum PDIP dengan Jokowi. (Tempo, 2014) Bahasa simbol yang juga digunakan Majalah Tempo untuk membangun citra Jokowi sebagai pemimpin yang buruk dengan judul "Nawadosa Jokowi" di mana visi-misi nawacita diubah menjadi 9 dosa Jokowi dan menjelaskan begitu kompleksnya Jokowi melakukan upaya perusakan demokrasi di Indonesia demi melanggengkan kekuasaannya. (Tempo, 2024)

Sebagaimana dijelaskan oleh Chan dan Lee (1989) dalam *Shifting Journalistic Paradigms*, media memiliki paradigma jurnalistik yang berubah seiring dengan tekanan eksternal seperti

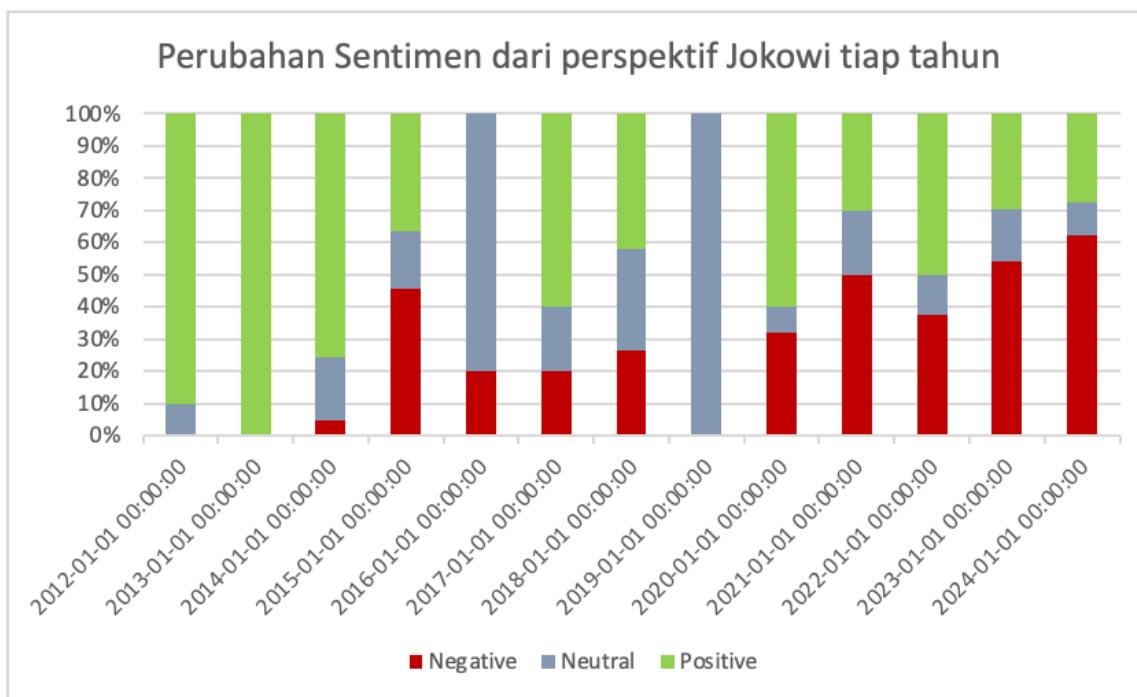
redistribusi kekuasaan dan dinamika politik. Dalam kasus Indonesia, perubahan wacana Majalah Tempo terhadap Jokowi pada periode 2012-2024 mencerminkan bagaimana media merespons konsolidasi kekuasaan yang terjadi di bawah pemerintahan Jokowi, mulai dari awal kemunculannya sebagai simbol demokrasi hingga kritik terhadap kebijakannya yang dinilai pragmatis dan bertentangan dengan nilai demokrasi.

Seperti yang telah disinggung oleh peneliti sebelumnya, fenomena pergeseran wacana Jokowi sebagai pemimpin berkaitan dengan isu demokrasi dapat diamati dengan sangat jelas melalui pemberitaan Majalah Tempo. Peneliti mencoba melakukan analisis sentimen terhadap pemberitaan Majalah Tempo tentang Jokowi pada periode 2012 - 2024. Analisis ini menggunakan mesin monitoring *Intelligence Media Analytics* (IMA) yang digunakan lembaga monitoring sentimen media sosial Indonesia Indikator. Analisis sentimen dalam konteks ini berfokus pada interpretasi sentimen atau sikap majalah Tempo terhadap Jokowi dalam setiap tahapan karir politiknya, terutama dalam isu-isu demokrasi elektoral. Analisis ini menggunakan teknik *Natural Language Processing* (NLP) untuk mengukur sentimen positif, netral, atau negatif pada setiap artikel atau bagian artikel.

Algoritma ini mengidentifikasi kata-kata kunci yang mengindikasikan dukungan, kritik, atau netralitas, serta memeriksa konteks dari kata-kata tersebut dalam kalimat atau paragraf. Model yang umum untuk ini adalah pendekatan *supervised learning*, di mana data dilatih dengan label sentimen tertentu untuk mengenali pola sentimen dalam teks lain. (Munasatya dan Novianto, 2020) Analisis sentimen yang berfokus pada perspektif Jokowi akan mengidentifikasi bagaimana media menggambarkan niat dan tindakan Jokowi dalam kaitannya dengan demokrasi, seperti komitmennya pada pemberantasan korupsi atau pembangunan yang merata. Kata-kata kunci yang dimasukan dalam mesin monitoring ini, antara lain Jokowi, jokowi dan demokrasi, jokowi dan

politik, jokowi dan presiden, jokowi dan dinasti, gubernur jokowi, jokowi raja, dan lain-lain. Sebanyak 206 artikel berita yang ada di Majalah Tempo terkait kata kunci tersebut menjadi bahan monitoring dari mesin IMA yang digunakan sebagai alat monitoring sentimen dalam penelitian ini.

Secara grafik sentimen, pergeseran sentimen pemberitaan Majalah Tempo terkait Jokowi dan isu demokrasi dari data tersebut dapat terlihat sebagai berikut :



Gambar 1.1. Grafik sentimen pemberitaan Majalah Tempo tentang Jokowi periode 2012 - 2024. (Data diolah oleh peneliti dari 206 artikel berita Majalah Tempo)

Dari grafik sentimen pemberitaan Majalah Tempo tentang Jokowi pada periode 2012 - 2024 kita dapat memahami bahwa meskipun proporsi pemberitaan dengan sentimen negatif sifatnya fluktuatif, namun demikian terlihat jelas perbedaan bahwa pada periode 2012 - 2014 pemberitaan terkait Jokowi dan demokrasi didominasi dengan sentimen positif, sementara sejak 2022 - 2024 pemberitaan terkait Jokowi sentimennya didominasi oleh sentimen negatif.

Berdasarkan data perubahan sentimen terhadap Jokowi periode 2012–2024, terlihat adanya pergeseran signifikan dalam persepsi publik dari dominasi sentimen positif ke sentimen negatif.

Pada awal kepemimpinannya, sentimen positif mendominasi dengan angka 90–76% (2012–2014). Hal ini terkait citra Jokowi sebagai pemimpin baru yang membawa harapan perubahan, terutama menjelang Pilpres 2014. Namun, pada 2015, sentimen negatif meningkat drastis hingga 45%, menunjukkan munculnya kritik terhadap kebijakan ekonomi dan infrastruktur Jokowi. Sentimen netral mendominasi pada 2016–2019, dengan puncaknya 100% di tahun 2019, yang mencerminkan upaya media menyajikan narasi lebih objektif di tengah polarisasi Pilpres 2019. Memasuki periode 2020–2024, sentimen negatif terus meningkat dari 32% menjadi 62%, sejalan dengan kritik terhadap tindakan politik Jokowi, seperti cawe-cawe pemilu, dominasi politik berbasis dinasti, dan penggunaan bansos sebagai alat elektoral. Pergeseran ini menandakan perubahan wacana publik dan media yang mulai mempertanyakan komitmen demokrasi di bawah kepemimpinannya.

Dari pergerakan sentimen pemberitaan Tempo terkait isu Jokowi dan demokrasi tersebut, secara sederhana, kita dapat melihat 3 pembabakan periodisasi yang dimungkinkan, yaitu 1) periode 2012 - 2015 di mana pemberitaan Tempo terkait Jokowi masih didominasi oleh sentimen positif meskipun pada 2015 jumlah sentimen negatif cenderung meningkat dan sedikit lebih besar dibandingkan sentimen positif dan netral. Pada periode ini, secara rata-rata, sentimen positif mendominasi pemberitaan tentang Jokowi dengan presentase 75,5%, diikuti dengan sentimen negatif 12,5%, dan sentimen netral dengan 12%, 2) Pada periode 2016 - 2019, pemberitaan Majalah Tempo terkait Jokowi dan isu demokrasi cenderung didominasi oleh sentimen netral dengan rerata 48%, diikuti oleh sentimen positif 32,4%, dan 19,6% sentimen negatif. Meskipun, jumlah sentimen negatif pada periode ini masih yang terendah dibanding rata-rata dua sentimen lainnya, jumlah rata-rata sentimen negatif pada periode ini sudah meningkat dibandingkan pada periode sebelumnya (2012-2015) yang hanya 12,5%, 3) Periode 2020 - 2024, merupakan periode

di mana pemberitaan Majalah Tempo terkait Jokowi didominasi oleh pemberitaan dengan sentimen negatif. Hal tersebut, terlihat dari rata-rata pemberitaan dengan sentimen negatif yang mencapai 51%, diikuti oleh pemberitaan dengan sentimen positif yang hanya 34,5% dan sentimen netral 14,75%. Dari 3 periodisasi tersebut kita dengan jelas dapat melihat pergeseran wacana pemberitaan Majalah Tempo terkait Jokowi dan isu demokrasi, yang didominasi oleh pemberitaan positif di awal 2012 - 2014, dan didominasi oleh pemberitaan negatif pada masa akhir pemerintahan Jokowi pada 2021 - 2024.

1.1.1. Wacana Pemberitaan Tempo tentang Jokowi dan Isu Demokrasi Periode 2012 - 2015

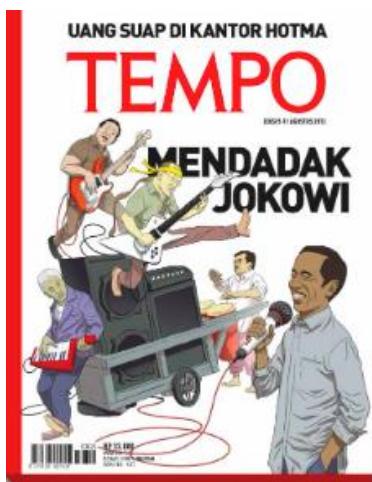
Transisi wacana terkait Jokowi dalam isu demokrasi dapat diamati dengan jelas melalui pemberitaan yang diproduksi oleh Majalah Tempo selama periode 2012–2024. **Pada fase awal, khususnya 2012–2015**, Tempo membangun narasi bahwa Jokowi adalah simbol harapan demokrasi di Indonesia. Sebagai pemimpin sederhana dan pro-rakyat, Jokowi dipandang sebagai sosok antitesis dari elite politik lama yang korup dan elitis. Kemenangan Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 bahkan disebut Tempo sebagai kemenangan demokrasi (24 September 2012). Seiring meningkatnya elektabilitas Jokowi dalam survei sebagai calon presiden 2014, Tempo secara konsisten mendorong pencalonan Jokowi dan mengontraskannya dengan Prabowo Subianto, yang dianggap sebagai representasi militerisme Orde Baru. Pada masa ini, Tempo menegaskan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang mampu membawa perubahan demokratis di tengah keterpurukan politik Indonesia. Beberapa halaman sampul atau cover majalah Tempo dan juga judul atau headline berita yang menunjukkan hal tersebut, antara lain :

1. Editorial : Gubernur Baru Jakarta Lama. WALAU terdengar klise, hasil pemilihan Gubernur DKI Jakarta bolehlah dianggap sebagai kemenangan demokrasi. Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama telah membalikkan peta kekuasaan. (Tempo, 2012)

2. Opini : Mendadak Jokowi (Tempo, 2013)

3. Laporan Utama : Tiga Elemen Pendongkrak Jokowi (Tempo, 2013)

4. Laporan Utama : Sudah Waktunya PDIP Memerintah (Tempo, 2014)



(Tempo Edisi 1 Agustus 2013)



(Tempo edisi 9 September 2013)



(Tempo edisi 6 Januari 2014)



(Tempo edisi 14 Juli 2014)



(Tempo edisi 28 Juli 2014)

(Tempo edisi 20 Oktober 2014)

1.1.2. Wacana Pemberitaan Tempo tentang Jokowi dan Isu Demokrasi Periode 2016 - 2020

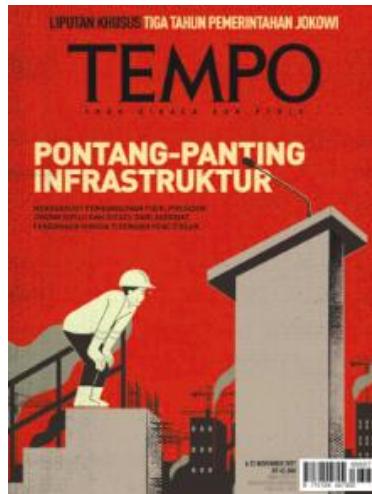
Pada periode 2016–2020, Majalah Tempo mulai menunjukkan perubahan sikap dengan munculnya kritik terhadap kebijakan Jokowi, khususnya terkait pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek besar, seperti kereta cepat Jakarta–Bandung, dinilai dilakukan tanpa perencanaan matang dan lebih berorientasi pada kepentingan elektoral. Kritik ini mencapai puncaknya dalam opini bertajuk “Pontang Panting Infrastruktur” (5 November 2017), di mana Tempo menyatakan bahwa kebijakan Jokowi cenderung pragmatis dan membebani keuangan negara melalui utang luar negeri yang agresif. Beberapa halaman sampul atau cover majalah Tempo dan juga judul atau headline berita yang menunjukkan hal tersebut, antara lain :

1. Editorial : Cepat-cepat Kereta Cepat : "Menjalankan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Presiden Joko Widodo tengah menempuh jalan yang keliru dan berbahaya"
(Tempo, 2016)

2. Editorial : Pontang-panting Infrastruktur (Tempo, 2017)



(Tempo edisi 8 Februari 2016)



(Tempo edisi 5 November 2017)

Pada medio 2018 - 2020 pun terlihat wacana tentang kepemimpinan Jokowi mulai berubah cukup signifikan, di mana kritik terhadap Jokowi semakin tajam. Majalah Tempo mulai menyoroti inkonsistensi Jokowi terhadap janji politiknya yang pro-demokrasi. Jokowi dinilai lebih fokus pada konsolidasi kekuasaan, terutama menjelang Pilpres 2019. Hal ini tercermin dari langkah Jokowi merangkul rival politiknya, Prabowo Subianto, yang sebelumnya diposisikan sebagai antitesis demokrasi. Tempo juga mengkritik revisi UU KPK, yang dinilai sebagai bentuk pelemahan lembaga antikorupsi dan bertolak belakang dengan citra Jokowi sebagai pemimpin antikorupsi di awal kemunculannya. Dalam edisi 18 Januari 2019, Tempo bahkan menyebut komitmen antikorupsi Jokowi sebagai "tinggal kenangan." Beberapa halaman sampul atau cover majalah yang menunjukkan hal tersebut, antara lain :



(Tempo Edisi 22 April 2018)



(Tempo edisi 3 Juni 2018)



(Tempo edisi 2 Maret 2019)



(Tempo Edisi 29 Juni 2019)



(Tempo edisi 14 September 2019)

1.1.3. Wacana Pemberitaan Tempo tentang Jokowi dan Isu Demokrasi Periode 2020 - 2024

Memasuki periode 2020–2024, kritik Majalah Tempo terhadap pemerintahan Jokowi semakin keras dan konsisten. Tempo mulai membangun wacana bahwa Jokowi telah melenceng dari semangat demokrasi dengan melakukan praktik politik dinasti, seperti mencalonkan anaknya, Gibran Rakabuming, sebagai Wali Kota Solo dan menantunya, Bobby Nasution, sebagai Wali Kota Medan. Praktik ini dinilai bertolak belakang dengan janji Jokowi sebagai pemimpin yang pro-rakyat. Lebih lanjut, Tempo juga menyoroti penanganan pandemi Covid-19 yang dinilai gagal, dengan kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan ekonomi dibanding kesehatan publik.

Dalam edisi 25 Januari 2020, Tempo mengkritik pengesahan UU Cipta Kerja yang dianggap terburu-buru, tertutup, dan hanya menguntungkan segelintir pengusaha.

Pada periode ini pula, Tempo semakin tegas mengaitkan Jokowi dengan upaya perusakan demokrasi melalui berbagai kebijakan dan tindakan politiknya. Kritik ini mencakup pemaksaan pembangunan Ibu Kota Nusantara, wacana penundaan pemilu, dan intervensi terhadap institusi demokrasi seperti Mahkamah Konstitusi. Bahkan, Majalah Tempo menerbitkan edisi khusus Nawadosa yang menyoroti sembilan dosa politik Jokowi, sebagai simbol kontras terhadap Nawacita, visi dan janji Jokowi saat awal mencalonkan diri sebagai presiden. Beberapa halaman sampul atau cover majalah yang menunjukkan hal tersebut, antara lain :



(Tempo edisi 25 Januari 2020)



(Tempo edisi 14 Maret 2020)



(Tempo edisi 13 Juni 2020)



(Tempo edisi 2 April 2022)



(Tempo edisi 5 Februari 2023)



(Tempo edisi 2 Juli 2023)



(Tempo edisi 29 Oktober 2023)



(Tempo edisi 12 Mei 2024)



(Tempo edisi 25 Agustus 2024)

Secara keseluruhan, pemberitaan Majalah Tempo terkait Jokowi dalam isu demokrasi periode 2012–2024 dapat dikategorikan ke dalam tiga fase besar. **Fase pertama (2012–2015)** Majalah Tempo membangun wacana Jokowi sebagai simbol harapan demokrasi, pemimpin yang pro-rakyat, dan antitesis dari elite politik lama, Jokowi disimbolkan oleh Majalah Tempo sebagai pemimpin yang baik dan tepat untuk memimpin masyarakat Indonesia. **Fase kedua (2016 - 2019)** menunjukkan pergeseran wacana yang lebih kritis, di mana Jokowi disimbolkan sebagai pemimpin yang pragmatis, dan tidak menunjukkan perbedaan dengan politisi lainnya yang lebih mengedepankan kepentingan elektoral. Sementara **Fase ketiga (2020 -2024)** wacana yang dibangun sudah lebih konsisten di mana Jokowi disimbolkan melakukan upaya merusak demokrasi melalui praktik politik dinasti, pelemahan lembaga demokrasi, dan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Jokowi pada fase ini disimbolkan oleh Majalah Tempo sebagai pemimpin yang buruk yang bahkan tidak patut untuk ditiru oleh pemimpin Indonesia selanjutnya. Pergeseran wacana ini menjadi refleksi dari perubahan citra dan simbol Jokowi di mata publik dan media, yang menarik untuk diteliti dalam konteks dinamika politik dan demokrasi Indonesia.

Peneliti menduga terjadinya pergeseran wacana yang diproduksi oleh Majalah Tempo terkait Jokowi dari yang awalnya disimbolisasikan sebagai pemimpin baik yang lahir dan membawa nilai-nilai demokrasi menjadi seorang raja Jawa yang merusak demokrasi mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor kognisi sosial media (wartawan dan editor) dan juga konteks sosial-politik. Van Dijk (2001) misalnya menjelaskan bahwa konsep kognisi sosial dalam analisis wacana merujuk pada bagaimana pengetahuan, keyakinan, ideologi, dan norma sosial membentuk cara orang memahami dan memproduksi teks. Van Dijk (2001) mengadopsi pendekatan dari psikologi sosial untuk menjelaskan bahwa kognisi individu tidak terlepas dari konstruksi sosial. Dalam konteks media, misalnya, wartawan tidak hanya menulis berita berdasarkan fakta, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang tertanam dalam kesadaran mereka. Kognisi sosial, dalam hal ini, menjadi perantara antara struktur sosial dan teks yang diproduksi (Van Dijk, 2001).

Pada konteks penelitian ini, penulis menduga nilai-nilai sosial bahwa pemimpin yang baik dan pantas memimpin di Indonesia adalah pemimpin yang lahir atau mencerminkan nilai demokrasi tertanam dalam benak wartawan Majalah Tempo. Dengan demikian, sangat dimungkinkan nilai sosial atau ideologi tersebut mempengaruhi cara pandang wartawan Tempo dalam memproduksi berita tentang Jokowi. Saat Jokowi pertama kali muncul di panggung politik nasional sebagai politisi yang tidak berasal dari kalangan elit politik, dan gaya kepemimpinannya yang tidak berjarak dengan rakyat, maka Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang paling baik oleh wartawan Tempo. Atas dasar itu lah mungkin Majalah Tempo pada medio 2012-2014 memproduksi wacana Jokowi dengan simbol pemimpin yang merakyat, pekerja keras, dan paling tepat memimpin Indonesia. Majalah Tempo edisi 20 Oktober 2014 menampilkan Jokowi dengan baju kotak-kotak sederhananya di tempat pemotongan kayu dengan judul "Kerja,

Kerja, Kerja" (Tempo, 2014) menunjukkan simbolisasi Jokowi sebagai pemimpin yang akan bekerja untuk rakyatnya. Dengan kognisi sosial yang sama, di mana wartawan Tempo memandang bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjunjung atau bahkan mengedepankan demokrasi, maka ketika Jokowi pada akhir kepemimpinannya dianggap melanggengkan politik dinasti yang berlawanan dengan prinsip demokrasi, simbolisasi Jokowi yang diproduksi Majalah Tempo pun berubah menjadi pemimpin buruk bahkan berdosa terhadap rakyat Indonesia. Hal itu misalnya terlihat dalam Majalah Tempo edisi 28 Juli 2024 yang menampilkan halaman sampul wajah jokowi tersenyum dalam kegelapan dan berjudul "Nawadosa Jokowi" (Tempo, 2024). Menjadi menarik untuk diteliti apakah benar kognisi sosial wartawan dan editor Majalah Tempo yang memandang bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjunjung nilai demokrasi benar mempengaruhi terjadinya pergeseran produksi simbol Jokowi pada Majalah Tempo periode 2012-2024.

Seperti yang telah disampaikan oleh penulis sebelumnya, selain kognisi sosial wartawan dan editor Majalah Tempo yang diduga menjadi faktor yang bisa menjelaskan berubahnya wacana tentang Jokowi yang diproduksi oleh Majalah Tempo, beberapa faktor dalam konteks sosial-politik juga dimungkinkan menjadi penyebab berubahnya wacana simbolisasi terhadap Jokowi yang diproduksi oleh Majalah Tempo pada 2012-2024. Terkait konteks sosial-politik, Hall dalam Davis (2007) menekankan bahwa media massa berperan penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap dunia sekitar. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk opini dan narasi sosial yang dapat mempengaruhi kesadaran kolektif (Davis, 2007). Dalam konteks ini, media sering kali berperan dalam mereproduksi ideologi dominan yang mendukung status quo sosial, politik, dan ekonomi (Davis, 2007). Bahkan, Davis (2007) menjelaskan di dalam masyarakat kapitalis, media menjadi alat utama untuk

mempromosikan ideologi yang mendukung kepentingan kelompok berkuasa, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya.

Studi Tapsell (2012) dalam *Politics and the Press in Indonesia* menunjukkan bagaimana kepemilikan media dan pengaruh ekonomi-politik dapat mengintervensi independensi media dalam memberitakan suatu isu. Tapsell (2012) mencontohkan kasus Lumpur Lapindo, di mana strategi humas yang dilakukan oleh Bakrie Group mencoba membentuk opini publik melalui kerjasama dengan editor dan iklan berbayar. Meskipun strategi ini gagal di beberapa media independen seperti Tempo dan Kompas, fenomena ini memperlihatkan bahwa media tidak sepenuhnya kebal terhadap tekanan kekuasaan politik maupun ekonomi (Tapsell, 2012).

Dalam studinya tentang budaya jurnalisme beberapa negara di dunia, Hanitzsch (2011) mengidentifikasi bahwa jurnalis di Indonesia lebih berorientasi pada terciptanya perubahan sosial-politik. Indonesia, dalam studi Hanitzsch (2011) terletak di wilayah dengan tingkat intervensi yang lebih tinggi, yang berarti bahwa jurnalis di Indonesia lebih cenderung mendukung perubahan sosial dan nilai tertentu dibandingkan dengan jurnalis di negara-negara Barat. Hal ini menunjukkan perbedaan dalam peran jurnalis yang lebih terlibat secara sosial dan politik. (Hanitzsch, 2011). Indonesia juga menunjukkan ketegangan antara peran *watchdog* terhadap pemerintah dan elit bisnis, meskipun banyak negara yang lebih kritis terhadap elit, di Indonesia jurnalis lebih cenderung bekerja dalam hubungan yang lebih kooperatif dengan pemerintah dan elit politik. (Hanitzsch, 2011). Sementara itu, dalam hal epistemologi, Hanitzsch (2011) menilai Indonesia menunjukkan ketidaksetujuan yang lebih tinggi terhadap pemisahan yang tegas antara fakta dan opini. Hal ini mengindikasikan bahwa jurnalis di Indonesia mungkin lebih cenderung menggabungkan opini dalam pemberitaan mereka (Hanitzsch, 2011). Indonesia juga lebih cenderung mendukung pendekatan situasional dalam etika jurnalistik, yang berarti bahwa jurnalis

di Indonesia lebih fleksibel dalam penerapan prinsip etika tergantung pada konteks dan situasi yang dihadapi (Hanitzsch, 2011). Dari penjelasan Hanitzsch terkait budaya jurnalisme di Indonesia, sangat dimungkinkan, para jurnalis Majalah Tempo berdasarkan konteks situasi yang dihadapi berorientasi melakukan perubahan sosial dan politik di masyarakat, sehingga melakukan perubahan dalam produksi wacana terkait simbol Jokowi sebagai pemimpin dan demokrasi pada periode 2012-2024.

Orientasi perubahan sosial - politik yang mungkin ada pada diri jurnalis Majalah Tempo saat melakukan perubahan produksi wacana terkait Jokowi dan demokrasi misalnya dapat dilihat dari Majalah Tempo yang coba menolak intervensi negara terhadap kebijakan editorial Majalah Tempo. Intervensi dalam hal ekonomi coba dilakukan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dengan menawarkan kontrak bernilai miliaran rupiah dan akses untuk wawancara ekslusif dengan Presiden Jokowi kepada Majalah Tempo jika ingin memberitakan keberhasilan pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. (Lubis, 2024) Beberapa media lain misalnya mendapatkan kontrak senilai ratusan juta rupiah tanpa proposal tertulis untuk memberikan kesuksesan pemerintahan Jokowi. (Lubis, 2024). Pada konteks ini, kita bisa memahami bagaimana negara dalam hal ini pemerintahan Jokowi di masa akhir kepemimpinannya mencoba melakukan tekanan terhadap media salah satunya melalui tekanan ekonomi. Majalah Tempo dalam konteks ini sangat dimungkinkan tidak terpengaruh terhadap tekanan ekonomi yang coba dilakukan oleh negara dan justru mencoba melakukan perubahan sosial-politik dengan memproduksi simbol dan wacana bahwa Jokowi adalah pemimpin yang buruk di masa akhir kepemimpinannya.

Dalam konteks Majalah Tempo, pergeseran wacana terkait Jokowi sangat mungkin dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan realitas politik Indonesia. Pada periode awal

2012–2015, Tempo membangun simbol Jokowi sebagai pemimpin demokratis sederhana yang menjadi simbol perlawanan terhadap elite politik lama, sehingga menjadi sosok pemimpin yang paling tepat untuk memimpin Indonesia. Namun, seiring berjalananya waktu, terutama pada periode-periode selanjutnya, yakni 2016-2019 dan periode 2020-2024, Tempo mulai mengkritisi kebijakan Jokowi, seperti pembangunan infrastruktur yang pragmatis, pelemahan lembaga antikorupsi, dan praktik politik dinasti. Pergeseran ini mencerminkan upaya media untuk mempertahankan independensi dan fungsi kontrol terhadap kekuasaan, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori Chan dan Lee (1989).

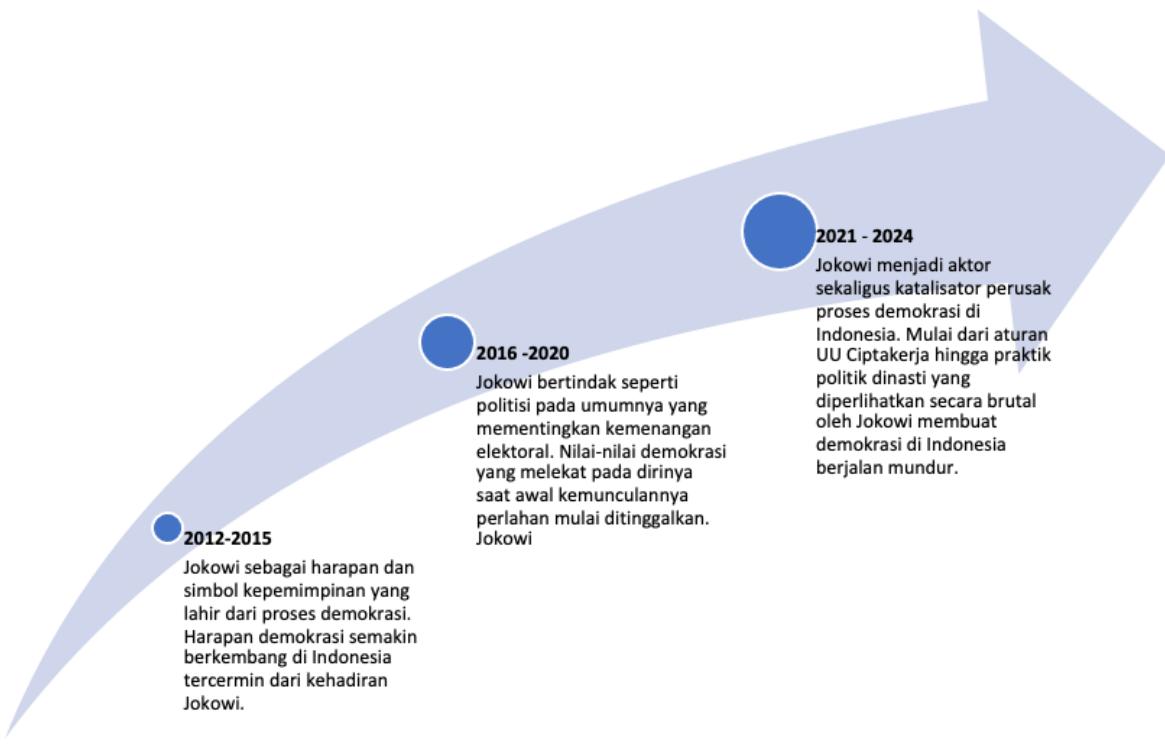
Fenomena yang terjadi pada Majalah Tempo dalam hal terjadinya perubahan produksi wacana simbol terkait sosok pemimpin Jokowi pada periode 2012-2024 menjadi relevan untuk diteliti melalui pendekatan analisis wacana kritis (CDA). Hal itu dilakukan guna memahami relasi antara media, kekuasaan, dan dinamika sosial-politik. Apakah hal-hal tersebut mempengaruhi Majalah Tempo dalam memproduksi simbol kepemimpinan tentang Jokowi sehingga terdapat pergeseran yang cukup signifikan sejak tahun 2012 hingga 2024 menjadi hal yang oleh penulis dianggap layak untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, dapat dipahami bahwa terjadi transisi wacana yang signifikan dalam pemberitaan Majalah Tempo terkait sosok Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin dalam konteks isu demokrasi selama rentang waktu 2012–2024. Secara umum, pada periode 2012–2015, Majalah Tempo masih mensimbolkan Jokowi sebagai harapan demokrasi. Jokowi dipresentasikan sebagai sosok pemimpin yang lahir dari rahim demokrasi, berkarakter sederhana, dan bertindak cukup demokratis, baik ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun sebagai Presiden Republik Indonesia.

Namun, pada periode 2016–2019, terjadi perubahan wacana yang cukup drastis. Majalah Tempo mulai menggambarkan Jokowi sebagai pemimpin yang tidak lagi berupaya menunaikan cita-cita reformasi dan bertindak sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Kritik Majalah Tempo semakin tajam dengan menyoroti kegagalan Jokowi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, bahkan memberikan ruang dan kekuasaan kepada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat tersebut. Puncaknya terjadi pada periode 2020–2024, di mana Majalah Tempo memproduksi wacana bahwa Jokowi justru menjadi pihak yang merusak perkembangan demokrasi di Indonesia melalui praktik politik dinasti. Jokowi bahkan disimbolkan sebagai raja jawa yang hanya mementingkan kelanggengan kekuasaan keluarganya tanpa mengindahkan nilai demokrasi. Hal ini terlihat jelas ketika Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi, diusung sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Majalah Tempo menyoroti bahwa Gibran, yang semula tidak memenuhi syarat administratif sebagai cawapres berdasarkan UU Pemilu, pada akhirnya dapat maju setelah Mahkamah Konstitusi—yang saat itu diketuai oleh Anwar Usman, paman Gibran—mengubah aturan tersebut.

Dari rentang waktu tersebut, peneliti mengidentifikasi tiga titik monumental yang mencerminkan pergeseran wacana Majalah Tempo terkait simbolisasi sosok Jokowi dalam isu demokrasi. Pergeseran wacana ini dapat dipahami lebih lanjut melalui grafik berikut:



Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana transisi wacana yang diproduksi Majalah Tempo terkait Jokowi dalam isu demokrasi dalam level textual?
2. Pada level praktik diskursif, bagaimana pergeseran kognisi sosial jurnalis Tempo tentang Jokowi dalam isu demokrasi dari 2012 - 2024?
3. Pada level praktik sosio-kultural, bagaimana konteks praktik sosial-ekonomi dan sosial-politik yang mempengaruhi terjadinya transisi wacana Jokowi dalam isu demokrasi?

1.3 Identifikasi Masalah

Dari rumusan masalah yang dituliskan oleh peneliti sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Beberapa masalah tersebut, yaitu :

1. Terjadi transisi wacana yang cukup drastis yang diproduksi oleh Majalah Tempo terkait Jokowi dalam isu demokrasi pada rentang waktu 2012 - 2024.
2. Kognisi sosial jurnalis Majalah Tempo mempengaruhi proses terjadinya transisi wacana Jokowi dalam isu demokrasi pada rentang waktu 2012 - 2024.
3. Terdapat konteks sosial-ekonomi dan sosial-politik yang mempengaruhi proses transisi wacana Jokowi dalam isu demokrasi pada rentang waktu 2012-2024.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu :

1. Mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait fenomena komunikasi politik, di mana terjadi transisi wacana Jokowi dalam isu demokrasi khususnya pada rentang waktu 2012 - 2024.
2. Mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait pengaruh kognisi sosial wartawan atau insan media terhadap pembuatan wacana publik.
3. Mendapatkan pemahaman yang komprehensif bagaimana konteks sosial-ekonomi dan sosial-politik mempengaruhi proses pergeseran wacana publik, khususnya terkait Jokowi dalam isu demokrasi pada rentang waktu 2012-2024.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Memberikan referensi tambahan terhadap perkembangan ilmu komunikasi politik, khususnya studi terkait analisis wacana publik.
2. Penelitian ini akan memperkuat temuan secara ilmiah bahwa pergeseran wacana politik yang ada dalam masyarakat dapat terjadi atas kontribusi pemberitaan media nasional.
3. Penelitian ini akan memperkuat temuan secara ilmiah bahwa pergeseran wacana publik yang dilakukan oleh media mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kognisi dari wartawan dan editor, serta konteks sosial politik yang ada.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan para pengambil kebijakan sebagai referensi bagaimana bertindak sesuai dengan konteks sosial - politik di masyarakat yang terus mengharapkan tumbuh dan berkembangnya iklim demokrasi di Indonesia.
2. Bagi insan media, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengambil kebijakan redaksi ke depannya, khususnya dalam hal menilai dan menginformasikan pemimpin politik di Indonesia ke depannya.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan baru khususnya dalam memahami terjadinya transisi wacana publik terkait kepemimpinan seorang pemimpin politik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Melihat pergeresan wacana yang begitu signifikan tentang Jokowi dan Demokrasi pada awal kemunculannya sebagai tokoh nasional (Walikota Solo - Presiden) dan setelah ia menjabat sebagai presiden, maka peneliti menilai analisis wacana menjadi salah satu metode yang paling relevan untuk mengkerangkai penelitian ini. Terkait itu, beberapa penelitian terdahulu bagaimana media bisa merubah sikapnya dalam memberitakan suatu hal serta terkait Jokowi dan demokrasi bisa dilihat secara periodik melalui beberapa literatur yang banyak ditulis oleh para akademisi politik.

2.1.1 *Media Shifting* di Indonesia

Perubahan peran media massa dalam masyarakat modern, yang dikenal sebagai *media shifting*, mencerminkan dinamika hubungan antara politik, ekonomi, dan sosial. Media massa yang awalnya hanya menjadi penyampai informasi kini semakin berkembang menjadi aktor politik yang strategis. Fenomena ini membawa dampak pada cara media menjalankan fungsi demokrasi, terutama dalam membentuk opini publik dan memengaruhi kebijakan. Selain itu, peran media juga sering kali dibatasi oleh kepentingan pemiliknya, menciptakan tantangan baru dalam mempertahankan independensi media (Page, 1996; Tapsell, 2012).

Benjamin I. Page (1996) dalam *The Mass Media as Political Actors* menekankan bahwa media bukanlah institusi pasif yang hanya menyediakan informasi, melainkan aktor politik yang aktif. Media menggunakan teknik seperti *framing* untuk mengarahkan perhatian publik pada sudut pandang tertentu, sering kali menciptakan narasi yang mendukung kepentingan ekonomi atau

politik pemiliknya. Teknik ini memperlihatkan bagaimana media dapat mengarahkan persepsi publik terhadap isu-isu tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit.

Teknik *framing* ini didukung oleh proses *agenda-setting*, di mana media menentukan isu-isu mana yang layak menjadi perhatian masyarakat dan pembuat kebijakan. Dumitrescu dan Mughan (2010) mencatat bahwa proses ini memberikan media kekuasaan besar dalam menentukan prioritas kebijakan publik. Namun, fokus media pada isu-isu yang menarik secara komersial sering kali mengorbankan isu-isu yang lebih relevan secara sosial. Hal ini menciptakan bias yang signifikan dalam demokrasi, karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang terinformasi.

Dalam konteks Indonesia, Ross Tapsell (2012) dalam *Politics and the Press in Indonesia* mengungkap bahwa konsentrasi kepemilikan media menjadi hambatan besar bagi kebebasan pers. Pasca-reformasi 1998, sembilan grup bisnis besar mendominasi lebih dari separuh media cetak di Indonesia (Haryanto, 2010). Kepemilikan yang terkonsentrasi ini menciptakan situasi di mana media digunakan sebagai alat propaganda oleh elite ekonomi dan politik. Contoh paling nyata adalah kasus *Surabaya Post*, di mana akuisisi oleh Aburizal Bakrie pada 2008 mengubah arah editorial media tersebut untuk mendukung narasi yang menguntungkan kepentingannya.

Dalam studi kasus *Surabaya Post*, Tapsell (2012) menunjukkan bagaimana istilah "Lumpur Lapindo" diubah menjadi "Lumpur Sidoarjo" untuk mengalihkan perhatian publik dari keterlibatan Bakrie Group dalam bencana tersebut. Tekanan yang diberikan kepada jurnalis untuk menyensor diri mereka sendiri mencerminkan ancaman terhadap independensi media. Fenomena

ini menunjukkan bagaimana kepemilikan media dapat merusak fungsi media sebagai pengawas kekuasaan.

Fenomena serupa terjadi di Hong Kong selama transisi kedaulatan dari Inggris ke Tiongkok. Chan dan Lee (1989) dalam *Shifting Journalistic Paradigms* menunjukkan bahwa media Hong Kong menyesuaikan narasi mereka untuk mengakomodasi perubahan kekuasaan. Media kiri-ultra, misalnya, yang sebelumnya kritis terhadap pemerintahan kolonial Inggris, mulai mendukung proyek pembangunan pemerintah kolonial setelah penandatanganan *Sino-British Joint Declaration*. Strategi ini mencerminkan bagaimana media dapat digunakan untuk menyesuaikan diri dengan kekuasaan baru yang muncul.

Zhang dan Chia (2006) memberikan perspektif lain dengan menyoroti hubungan antara konsumsi media, modal sosial, dan partisipasi politik. Mereka menemukan bahwa konsumsi media massa yang berorientasi pada informasi publik, seperti berita politik, memiliki dampak positif terhadap kesadaran politik masyarakat. Sebaliknya, konsumsi media untuk hiburan tidak memiliki dampak yang sama. Hal ini menyoroti pentingnya jenis konten dalam menentukan pengaruh media terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Namun, kendala terbesar yang dihadapi media adalah kontrol pemilik. Page (1996) mencatat bahwa pemilik media sering kali memengaruhi kebijakan editorial melalui mekanisme seperti rekrutmen selektif jurnalis dan pengawasan konten. Dalam beberapa kasus, pemilik media secara langsung menggunakan kekuasaan mereka untuk membentuk narasi tertentu yang

mendukung kepentingan politik atau ekonomi mereka. Bias ini sering kali tidak terlihat oleh audiens tetapi memiliki dampak besar pada cara isu-isu politik dipahami.

Di Indonesia, tekanan ekonomi dan ketergantungan pada pendapatan iklan juga menjadi tantangan utama bagi independensi media. Tapsell (2012) mencatat bahwa banyak media besar di Indonesia bergantung pada pendapatan iklan dari perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan elite politik. Ketergantungan ini menciptakan konflik kepentingan yang signifikan, di mana media lebih cenderung mendukung narasi yang menguntungkan pemberi iklan daripada melaporkan kebenaran secara objektif.

Konteks global memberikan wawasan tambahan tentang *media shifting*. Dumitrescu dan Mughan (2010) mencatat bahwa tekanan ekonomi dalam industri media modern sering kali menyebabkan media lebih fokus pada konten yang menarik perhatian audiens daripada informasi yang berimbang. Hal ini menyebabkan hilangnya sebagian peran media sebagai penyedia informasi yang dapat diandalkan. Akibatnya, publik tidak mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang isu-isu penting, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas demokrasi.

Selain itu, literatur ini menunjukkan bahwa tekanan politik terhadap media juga memiliki dampak yang signifikan. Chan dan Lee (1989) menyoroti bahwa media yang beroperasi di bawah kekuasaan politik yang otoriter cenderung kehilangan independensi mereka. Dalam kasus Hong Kong, media yang memiliki hubungan langsung dengan pemerintah Tiongkok mulai menyesuaikan narasi mereka untuk mendukung kebijakan pemerintah, bahkan jika hal itu merugikan masyarakat umum.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, diperlukan regulasi kepemilikan media yang lebih ketat untuk memastikan media tetap independen. Selain itu, pemberdayaan jurnalis melalui

pelatihan dan perlindungan hukum sangat penting untuk membantu mereka melawan tekanan internal maupun eksternal. Reformasi ini dapat membantu memulihkan fungsi media sebagai pilar demokrasi yang efektif dan sebagai penjaga kekuasaan.

Potret terjadinya *media shifting* menunjukkan bahwa media massa tidak hanya mencerminkan dinamika sosial dan politik, tetapi juga berperan aktif dalam membentuknya. Namun, peran ini sering kali terganggu oleh tekanan ekonomi, politik, dan kontrol pemilik. Literasi media yang lebih baik di kalangan masyarakat dan reformasi regulasi media menjadi langkah penting untuk memastikan media tetap menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi yang independen.

Terjadinya perubahan wacana yang diproduksi oleh media yang dimungkinkan terjadi karena pengaruh kognisi sosial wartawan dan juga konteks sosial politik yang terjadi juga dibahas oleh Hanitzsch, dkk (2011). Dalam artikelnya berjudul "*Mapping Journalism Cultures Across Nations*" ditemukan bahwa kecenderungan jurnalis Indonesia yang berorientasi melakukan perubahan sosial-politik. Studi yang dilakukan oleh Hanitzsch et al. (2011) menyoroti pentingnya budaya jurnalisme dalam memahami variasi praktik jurnalistik di berbagai negara. Budaya jurnalisme ini dipetakan melalui tiga dimensi utama: peran institusional, epistemologi, dan ideologi etika. Penelitian ini menggunakan teknik multidimensional scaling (MDS), yang diadaptasi menjadi CoPlot, untuk menghasilkan peta visual yang menggambarkan kesamaan dan perbedaan antar negara dalam budaya jurnalisme. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memetakan negara-negara berdasarkan seberapa besar mereka memprioritaskan nilai-nilai tertentu dalam praktik jurnalistik, seperti netralitas, detasemen, dan keterlibatan dalam perubahan sosial. CoPlot mengatasi keterbatasan MDS dengan menambahkan vektor-vektor yang menunjukkan

hubungan antar variabel, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana negara-negara ini mengelola peran jurnalistik mereka.

Dalam hal scoring, Hanitzsch et al. (2011) menggunakan teknik centering untuk mengurangi bias dalam pengumpulan data. Teknik ini mengoreksi kemungkinan bias respons (acquiescence bias), yang sering muncul dalam survei internasional, di mana responden cenderung memberikan jawaban yang lebih positif atau negatif tanpa memedulikan isi pertanyaan. Dengan menggunakan rata-rata negara dan menghitung selisihnya terhadap skor global, peneliti dapat mengukur sejauh mana nilai-nilai jurnalisme di setiap negara berbeda dari standar global. Skor yang terpusat ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang prioritas budaya jurnalisme masing-masing negara.

Studi ini juga menunjukkan variasi signifikan dalam cara jurnalis di negara-negara yang berbeda memandang peran mereka dalam masyarakat. Misalnya, detasemen dan monitoring pemerintah adalah fungsi jurnalistik yang dipandang penting secara global. Namun, terdapat perbedaan dalam hal intervensi dalam opini publik dan promosi perubahan sosial. Negara-negara Barat umumnya menunjukkan keterlibatan yang lebih rendah dalam intervensi sosial, sementara negara-negara dari dunia berkembang, termasuk Indonesia, lebih cenderung mendukung peran jurnalis yang lebih aktif dalam mendukung perubahan sosial. Ini mencerminkan adanya perbedaan nilai dalam peran institusional jurnalisme yang berkembang di negara-negara ini. Di Indonesia, jurnalis lebih cenderung terlibat dalam isu sosial dan politik, mendukung perubahan sosial, dan lebih fleksibel dalam pendekatan etika jurnalisme mereka. (Hanitzsch, 2011)

Dalam dimensi epistemologi, yang berkaitan dengan pemahaman tentang objektivitas dan kebenaran, Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk lebih menggabungkan opini dalam

pemberitaan mereka. Hal ini berbeda dengan negara-negara Barat yang lebih menekankan pada pemisahan antara fakta dan opini serta objektivitas dalam pelaporan berita. Sikap ini mencerminkan pendekatan yang lebih subjektif terhadap pemberitaan di Indonesia, di mana jurnalis seringkali tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memberikan interpretasi pribadi terhadap peristiwa yang terjadi.

Dari segi ideologi etika, Indonesia cenderung menunjukkan dukungan yang lebih besar terhadap pendekatan etika yang lebih situasional, di mana jurnalis merasa perlu menyesuaikan keputusan etis mereka dengan konteks atau situasi tertentu. Pendekatan ini lebih fleksibel dibandingkan dengan negara-negara Barat yang lebih mendukung penerapan prinsip etika yang universal dan konsisten, tanpa banyak memperhatikan konteks. Di Indonesia, jurnalis juga lebih terbuka terhadap kemungkinan memberikan informasi yang tidak sepenuhnya terverifikasi jika itu dianggap penting untuk kepentingan publik atau kebaikan yang lebih besar.

Secara keseluruhan, hasil penelitian Hanitzsch (2011) menunjukkan bahwa budaya jurnalisme di Indonesia lebih bersifat fleksibel, interventionis, dan berorientasi pada perubahan sosial dibandingkan dengan budaya jurnalisme di negara-negara Barat, yang lebih menekankan detasemen dan objektivitas. Pemahaman ini memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana konteks politik dan sosial memengaruhi cara jurnalis di Indonesia mengelola peran mereka dalam masyarakat dan bagaimana mereka mendekati masalah etika dan epistemologi dalam pekerjaan mereka.

Sementara itu, studi McCargo (2004) menjelaskan bahwa media di negara-negara Asia termasuk Indonesia tidak bisa digolongkan dengan sistem media *Polarized Pluralist* di mana media dapat dilihat mengikuti garis politik yang jelas. Menurut McCargo, banyak media di Asia,

seperti di Thailand dan Indonesia, tidak hanya berperan sebagai alat politik yang statis, tetapi berfungsi dengan cara yang lebih fleksibel dan sering kali bertentangan dengan peran tradisional mereka. Media di negara-negara ini sering kali berubah-ubah peran dan afiliasi politiknya, tergantung pada situasi dan perubahan politik yang terjadi. McCargo memperkenalkan konsep *partisan polyvalence* untuk menggambarkan fenomena ini, yaitu media yang dapat memainkan banyak peran politik sekaligus, terkadang mendukung pemerintah, terkadang menjadi oposisi, dan sering kali bertindak sebagai mediator atau agen perubahan sosial.

Menurut McCargo, penting untuk melihat media sebagai agen yang memiliki kebebasan untuk beradaptasi dengan kondisi sosial-politik yang berubah. Dia mengkritik pendekatan yang terlalu terstruktur dan kaku dalam menganalisis media, dan menekankan perlunya melihat realitas yang lebih kompleks, yang mencakup interaksi yang tidak terduga antara media, negara, dan kekuatan politik. McCargo menyarankan bahwa media di Asia sering kali beroperasi dalam lingkungan yang sangat cair dan ambigu, di mana peran mereka tidak terbatas pada dukungan atau kritik terhadap satu pihak politik saja. Sebaliknya, media bisa berubah seiring dengan waktu dan situasi politik, sering kali berfungsi sebagai saluran bagi berbagai kepentingan yang saling bertentangan.

Di Asia, McCargo berpendapat bahwa media tidak selalu mengikuti garis partai politik yang jelas, seperti yang terlihat di negara-negara dengan sistem media *Polarized Pluralist*. Sebaliknya, media di Asia cenderung lebih fleksibel dan sering kali mencerminkan pluralisme internal, dengan banyak aktor yang memiliki pengaruh dalam menentukan arah pemberitaan. McCargo juga menyoroti perbedaan yang signifikan antara media di Asia dan di negara-negara Barat dalam hal profesionalisme jurnalisme. Di negara-negara Barat, jurnalisme sering kali didorong oleh norma-norma objektivitas dan netralitas, sedangkan di Asia, jurnalis sering kali

terlibat dalam proses pengumpulan berita yang lebih mekanis dan kolektif, yang lebih mengutamakan peran pribadi dan hubungan sosial antara jurnalis dan sumber berita mereka. Ini tidak berarti bahwa media di Asia kurang profesional, tetapi lebih bahwa profesionalisme di Asia sering kali mencakup bentuk-bentuk partisipasi yang lebih aktif dalam politik dan masyarakat. Di banyak negara Asia, jurnalis tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga terlibat dalam membentuk opini publik dan memainkan peran penting dalam politik domestik.

Masalah intervensi negara juga dibahas oleh McCargo, di mana dia menunjukkan bahwa negara-negara Asia sering kali memiliki hubungan yang sangat dekat dengan media, baik dalam hal kontrol langsung maupun pengaruh tidak langsung. Meskipun banyak negara Asia mengklaim memiliki kebebasan pers, McCargo berpendapat bahwa kenyataannya media di Asia sering kali berada di bawah tekanan untuk mendukung kebijakan negara dan mematuhi batasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Censorship sering kali terjadi, tetapi tidak selalu terlihat secara terang-terangan. Di banyak negara, kontrol negara terhadap media lebih bersifat tidak langsung, melalui pengaruh politik, kekuatan ekonomi, dan hubungan pribadi antara jurnalis dan pejabat pemerintah.

McCargo menyimpulkan bahwa media di Asia dan negara-negara berkembang lainnya tidak dapat dipahami melalui model perbandingan media yang ada, karena kompleksitas dan pluralitas yang ada dalam sistem media di wilayah ini. Media di Asia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berubah dengan cepat, dan sering kali berperan dalam mendukung atau menantang kekuasaan politik, tergantung pada situasi yang berkembang.

Adapun, studi Hallin dan Mancini (2004) menyebut, di banyak negara berkembang, salah satunya di Indonesia jurnalis sering kali bekerja dalam lingkungan yang penuh tekanan politik dan komersial, yang membuat standar objektivitas dan independensi jurnalistik sulit tercapai. Sebagai

contoh, dalam sistem media di negara-negara seperti Brasil dan Indonesia, jurnalis sering kali terlibat dalam jurnalisme yang lebih partisan dan terikat dengan kelompok politik atau bisnis tertentu, dibandingkan dengan model jurnalisme yang lebih netral yang umumnya ditemukan di negara-negara Barat. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme jurnalistik di negara-negara non-Barat sering kali lebih fleksibel dan dipengaruhi oleh hubungan sosial dan politik lokal.

2.1.2 Kognisi Sosial

Dalam penelitian ini, terjadinya pergeseran produksi wacana terkait simbolisasi Jokowi sebagai pemimpin dan demokrasi dimungkinkan terjadi karena dipengaruhi faktor kognisi sosial dari para wartawan dan editor Majalah Tempo. Menjadi penting untuk memahami konsep kognisi sosial yang digunakan dalam penelitian ini. Teun A. Van Dijk (2006) mengembangkan model analisis wacana yang dikenal sebagai kognisi sosial, yang menekankan bahwa analisis wacana tidak cukup hanya dengan menelaah teks secara terpisah. Teks bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari praktik produksi yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kognitif. Oleh karena itu, pendekatan Van Dijk menghubungkan analisis bahasa dengan proses kognitif yang terjadi dalam benak individu serta struktur sosial yang lebih luas. Model ini berupaya memahami bagaimana individu dan kelompok sosial memproses, menginterpretasikan, serta mereproduksi wacana dalam berbagai bentuk komunikasi.

Konsep kognisi sosial dalam analisis wacana Van Dijk merujuk pada bagaimana pengetahuan, keyakinan, ideologi, dan norma sosial membentuk cara orang memahami dan memproduksi teks. Ia mengadopsi pendekatan dari psikologi sosial untuk menjelaskan bahwa kognisi individu tidak terlepas dari konstruksi sosial. Dalam konteks media, misalnya, wartawan tidak hanya menulis berita berdasarkan fakta, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang

tertanam dalam kesadaran mereka. Kognisi sosial, dalam hal ini, menjadi perantara antara struktur sosial dan teks yang diproduksi.

Lebih lanjut, Van Dijk menjelaskan bahwa produksi teks dalam praktik wacana melibatkan dua aspek utama dalam kognisi sosial. Pertama, aspek mikro yang mencakup bagaimana individu, seperti wartawan atau politisi, memproses informasi berdasarkan skema kognitif yang mereka miliki. Kedua, aspek makro yang melibatkan norma, nilai, serta ideologi dominan dalam masyarakat yang mempengaruhi cara individu berpikir dan berbicara. Dengan demikian, kognisi sosial tidak hanya berperan dalam memahami teks, tetapi juga dalam menciptakan dan menyebarluaskan representasi sosial tertentu.

Analisis wacana Van Dijk juga menyoroti hubungan antara wacana dan kekuasaan, terutama bagaimana kelompok dominan menggunakan bahasa untuk mempertahankan hegemoni mereka. Teks sering kali mengandung strategi wacana yang mendukung kepentingan kelompok tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit. Misalnya, dalam pemberitaan media, bias tertentu dapat muncul melalui pemilihan kata, struktur narasi, atau framing informasi yang memperkuat stereotip tertentu. Dengan demikian, kognisi sosial juga berperan dalam mereproduksi ketimpangan sosial melalui wacana.

Dalam kajian kritisnya, Van Dijk mengidentifikasi strategi-strategi wacana yang digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan mempertahankan kekuasaan. Beberapa strategi ini meliputi polarisasi, yaitu pembagian antara "kita" dan "mereka" dalam teks; eufemisme, yaitu penggunaan bahasa yang lebih halus untuk menyamaraskan dominasi atau kekerasan simbolik; serta strategi persuasi yang bertujuan membentuk opini publik sesuai dengan kepentingan kelompok

tertentu. Melalui pendekatan ini, Van Dijk berupaya mengungkap bagaimana wacana dapat menjadi alat ideologis yang mempengaruhi cara masyarakat berpikir dan bertindak.

Secara keseluruhan, konsep kognisi sosial Van Dijk memberikan perspektif yang lebih mendalam dalam analisis wacana dengan menjelaskan keterkaitan antara struktur sosial, proses kognitif, dan produksi teks. Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam berbagai bidang, termasuk kajian media, politik, dan komunikasi, karena membantu memahami bagaimana ideologi dan kekuasaan bekerja dalam bahasa. Dengan memahami mekanisme kognisi sosial, kita dapat lebih kritis dalam menganalisis teks dan lebih sadar terhadap bagaimana wacana mempengaruhi realitas sosial yang kita hadapi.

2.1.3 Konteks Sosial - Politik

Dalam kajian tentang analisis wacana, pada konsep konteks sosial-politik, Davis (2007) menjelaskan bahwa media massa berperan penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap dunia sekitar. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk opini dan narasi sosial yang dapat mempengaruhi kesadaran kolektif. Dalam konteks ini, media sering kali berperan dalam mereproduksi ideologi dominan yang mendukung status quo sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini terjadi melalui seleksi berita, cara pemberitaan, dan framing yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Dengan kata lain, media menjadi instrumen yang memperkuat struktur kekuasaan yang ada dengan menormalisasi pandangan-pandangan tertentu, sehingga memperbesar ketimpangan antara kelompok-kelompok dominan dan yang terpinggirkan.

Mengutip Hall dan Davis (2007) menjelaskan bahwa di dalam masyarakat kapitalis, media menjadi alat utama untuk mempromosikan ideologi yang mendukung kepentingan kelompok

berkuasa, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya. Hall mengidentifikasi bahwa media, khususnya televisi dan surat kabar, sering kali menyajikan dunia melalui lensa yang sangat selektif—mengutamakan kepentingan pemilik media dan kelompok elit ekonomi. Misalnya, dalam pemberitaan ekonomi, media akan lebih sering menyoroti keuntungan perusahaan besar dan kebijakan pemerintah yang mendukung pasar bebas, sementara isu ketidaksetaraan sosial atau kerugian yang dialami oleh kelompok miskin atau pekerja jarang mendapat perhatian yang sama. Framing semacam ini mengukuhkan pandangan dunia yang cenderung menguntungkan pihak-pihak berkuasa dan memperkecil ruang untuk mendiskusikan alternatif sosial atau politik.

Framing ini, menurut Hall, bukanlah hasil dari kebetulan, melainkan suatu proses yang sengaja dibangun oleh media untuk menciptakan realitas tertentu. Dalam hal ini, media massa berperan sebagai agen yang membentuk pemahaman kita tentang apa yang dianggap penting, benar, atau salah. Proses ini sering kali terjadi tanpa disadari oleh khalayak, karena media mengemas informasi dengan cara yang dianggap obyektif dan netral. Namun, justru melalui pengemasan ini, ideologi dominan disebarluaskan secara halus. Misalnya, dalam berita mengenai konflik sosial, media sering menampilkan narasi yang menguntungkan pihak yang berkuasa atau yang memiliki posisi dominan, sementara suara dari pihak yang terpinggirkan atau terlibat dalam konflik tersebut sering kali dipersamakan dengan kekerasan atau ketidakstabilan.

Selain itu, Hall juga menyoroti bagaimana media menciptakan konsensus sosial melalui proses yang disebut sebagai "hegemoni". Konsep hegemoni ini merujuk pada dominasi ideologi tertentu dalam masyarakat yang diterima sebagai norma umum, meskipun ideologi tersebut mungkin tidak selalu mewakili kepentingan mayoritas. Media, dengan berbagai bentuk pemberitaan dan iklan, membantu memperkuat hegemoni ini dengan mengarahkan masyarakat untuk menerima cara pandang tertentu tanpa mempertanyakan dasar atau asal-usul pandangan

tersebut. Misalnya, ideologi neoliberalisme yang menekankan pentingnya pasar bebas dan pengurangan peran negara sering kali disajikan oleh media sebagai solusi tunggal untuk mengatasi masalah ekonomi, tanpa menyentuh dampak sosial atau ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Salah satu mekanisme yang digunakan media dalam mempertahankan hegemoni ini adalah melalui penciptaan representasi yang homogen dan stereotipik terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Hall menunjukkan bahwa media sering kali menggambarkan kelompok minoritas atau kelas bawah dalam stereotip yang negatif, misalnya sebagai individu yang malas, terbelakang, atau tidak mampu mengelola kehidupan mereka sendiri. Representasi semacam ini memperkuat ideologi yang melihat ketimpangan sosial sebagai hasil dari kesalahan individu, bukan akibat dari struktur sosial yang tidak adil. Dengan cara ini, media tidak hanya mereproduksi ketidaksetaraan, tetapi juga mengalihkan perhatian publik dari akar permasalahan yang lebih mendalam.

Dalam situasi politik yang semakin polarisasi, media juga memainkan peran penting dalam menciptakan dikotomi antara pihak-pihak yang dianggap sebagai "kami" versus "mereka". Hall mengamati bahwa media sering kali menyoroti perbedaan politik atau ideologi dengan cara yang memperburuk ketegangan sosial, sehingga memperkuat polarisasi dalam masyarakat. Berita yang cenderung memihak atau mengabaikan perspektif dari kelompok tertentu dapat memperburuk perpecahan yang sudah ada, alih-alih menciptakan dialog yang konstruktif. Dalam konteks ini,

media tidak hanya menjadi sarana informasi, tetapi juga instrumen yang memperburuk ketidakpercayaan sosial dan politik.

Namun, meskipun media sering kali berperan dalam memperkuat ideologi dominan, Hall juga mengakui adanya potensi untuk subversi dalam pemberitaan. Media massa, terutama dengan munculnya platform digital dan media sosial, memberikan ruang bagi alternatif-alternatif narasi dan suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan. Gerakan sosial dan kelompok yang selama ini tidak mendapat perhatian dari media tradisional kini dapat memanfaatkan ruang digital untuk menyebarkan ideologi mereka dan menantang dominasi narasi mainstream. Hall menekankan bahwa, meskipun hegemoni media sangat kuat, keberadaan ruang-ruang alternatif ini memberikan harapan untuk perubahan dan perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas.

Pada akhirnya, studi Hall tentang media dan ideologi menunjukkan bahwa media adalah arena pertempuran ideologis yang sangat penting. Media tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen yang membentuk kesadaran sosial dan politik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk kritis terhadap cara media menyampaikan informasi dan memahami bagaimana framing berita dapat mempengaruhi cara kita melihat dunia. Dengan kesadaran ini, masyarakat dapat mulai menantang narasi dominan dan membangun ruang untuk dialog yang lebih inklusif dan adil.

2.1.4 Jokowi dan Kepemimpinannya dalam Sistem Demokrasi di Indonesia

Berbagai jejak manuver Jokowi dalam konteks politik Indonesia bisa dilihat misalnya dari perspektif yang ditawarkan oleh Vedi Hadiz dan Robinson (2017) yang menilai bahwa kemunculan Presiden Jokowi di awal 2014 sebagai wacana harapan demokrasi dipengaruhi oleh tren global di mana tradisi liberal mengalami kemunduran dan institusi politik yang mapan gagal

mengatasi ketidakpercayaan publik yang semakin meningkat. Pemilihan Jokowi dianggap menandai era baru dalam politik Indonesia. Sebagai sosok yang berbeda dari elit politik di Jakarta, Jokowi memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang bisa mengatasi masalah sehari-hari yang dihadapi masyarakat. Namun, kemunculannya juga menunjukkan bahwa praktik politik uang dan partai berbasis patronase mungkin tidak lagi efektif untuk mengendalikan masyarakat yang merasa kecewa. Kini, politik Indonesia diwarnai oleh persaingan antara berbagai bentuk populisme, baik yang nasionalis sekuler maupun yang berorientasi Islam. (Hadiz dan Robinson, 2017)

Jokowi membawa harapan baru bagi masyarakat luas. Ia mendapatkan dukungan dari komunitas bisnis kecil dan masyarakat miskin di kota-kota dan daerah-daerah. Sebaliknya, Prabowo, yang memiliki kekuasaan dalam aparatur negara dan basis sosial yang kuat, mempromosikan agenda untuk mengkonsolidasikan kepentingan satu faksi oligarki, yang menimbulkan ancaman bagi kelompok oligarki lain di luar lingkarannya. Hal ini menunjukkan bahwa politik populis di Indonesia bukan hanya persaingan antar individu tetapi juga konflik antara berbagai kepentingan elit. (Hadiz dan Robinson, 2017)

Lebih lanjut, Mietzner (2015) menyoroti bahwa Jokowi berhasil menang di Pilpres 2014 karena adanya pertarungan antara golongan status quo demokratis dan mereka yang ingin mengembalikan reformasi demokrasi. Tahun 2014 menjadi titik balik penting sejak jatuhnya rezim otoriter pada tahun 1998, di mana pemilih Indonesia dihadapkan pada perbedaan mencolok antara dua kandidat utama. Jokowi mewakili status quo demokratis, didukung oleh Aliansi Muslim moderat dan kekuatan non-Muslim, sementara Prabowo mengusulkan kembali ke Konstitusi pra-demokrasi, didukung oleh partai-partai Islamis, mantan partai, dan Yudhoyono. Menurut Mietzner (2017), kemenangan Jokowi bukan hanya soal mempertahankan demokrasi, tetapi juga soal mengatasi berbagai tantangan yang muncul di era politik baru Indonesia. Keberhasilannya akan

sangat bergantung pada kemampuannya untuk menavigasi dinamika politik yang kompleks dan membawa perubahan positif bagi negara.

Kompleksitas politik membuat Jokowi di awal masa kepemimpinannya sebagai presiden harus mengambil berbagai langkah politik untuk memastikan ia dapat secara kuat memimpin pemerintahan. Tomsa (2017) menjelaskan bahwa Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil mengonsolidasi kekuasaannya dengan melaksanakan serangkaian strategi politik. Langkah-langkah tersebut mencakup perluasan koalisi pemerintahannya, perombakan kabinet, serta penunjukan kepala kepolisian yang diinginkannya. Melalui strategi ini, Jokowi bertujuan untuk memperkuat posisi politiknya dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Upaya konsolidasi ini mencerminkan ambisi Jokowi untuk mengukuhkan kontrolnya atas lembaga-lembaga negara dan memastikan dukungan yang lebih solid dari berbagai pihak.

Langkah Jokowi memperkuat kontrolnya terhadap institusi politik termasuk dengan memperkuat hubungannya dengan militer, sebuah wacana yang mulai bergeser saat kemunculannya sebagai capres 2014, di mana ia melawan tokoh militer (Prabowo) yang diasosiasikan dengan dengan Orde Baru. Presiden Jokowi mengembangkan hubungan dekat dengan militer bukan karena niat untuk mengembalikan kontrol militer di Indonesia, melainkan untuk memperluas koalisi politiknya dan mendapatkan nasihat mengenai urusan negara. Pada periode pertama jabatannya, Jokowi menghadapi tantangan memperluas koalisi politik di luar PDIP, yang dipimpin Megawati Sukarnoputri. Megawati sering kali menganggap Jokowi sebagai bagian kecil dalam mesin partai. Dukungan TNI, yang pada saat itu memiliki citra positif dan dipercaya, menjadi krusial bagi Jokowi dalam mencapai tujuannya. (IPAC, 2023).

Dalam upaya mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur dan pembangunan, Jokowi mengandalkan militer melalui serangkaian MoU antara TNI dan kementerian terkait. Langkah ini

memungkinkan Jokowi untuk bypass otoritas lokal dan mempercepat implementasi proyek, yang sering kali terhambat oleh prosedur birokrasi. Keterlibatan militer ini juga berdampak pada Papua, di mana pembangunan infrastruktur turut memicu ketegangan dan perlawanan kekerasan. Penunjukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan pada akhirnya melemahkan pengawasan sipil dan menunjukkan ketidaktertarikan Jokowi dalam memperkuat kontrol tersebut. Rekonsiliasi dengan Prabowo membantu memperoleh dukungan untuk proyek bisnis dan investasi Jokowi, terutama pembangunan ibu kota baru. Prabowo juga berusaha memperluas pengaruhnya melalui undang-undang PSDN yang memungkinkan pembentukan pasukan cadangan sipil, meskipun program ini mendapat kritik dan oposisi dari anggota PDIP yang khawatir pasukan tersebut akan disalahgunakan untuk mendukung pencalonan Prabowo pada pemilihan presiden 2024. (IPAC, 2023)

Proses konsolidasi politik yang dilakukan Jokowi disebut oleh Asrinaldi, dkk (2022) sebagai upaya memperkuat oligarki politik yang melemahkan fungsi DPR sebagai institusi demokrasi yang bertugas untuk menjalankan fungsi *check and balances*. Oligarki politik di bawah Presiden Jokowi menjadi kekuatan yang mengancam konsolidasi demokrasi dengan mengendalikan semua institusi negara. Karena elit partai politik di Indonesia terus melindungi kepentingan ekonomi dan kelangsungan kekuasaan politik mereka, oligarki akan terus mengendalikan fungsi DPR. Perilaku oligarki partai politik dalam pemerintahan Jokowi mengancam demokrasi Indonesia, di mana oligarki mengontrol anggota parlemen yang merupakan kader partai politik, menyebabkan mereka kehilangan fokus dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sebagai hasilnya, sikap kritis anggota DPR dalam legislasi undang-undang hampir tidak ada lagi, karena mayoritas anggota DPR dikendalikan oleh oligarki partai. Dengan demikian, pembentukan oligarki partai elit dengan pemerintah yang berkuasa telah membawa kembali pola

otoritarianisme yang mirip dengan era Orde Baru. Satu-satunya perbedaan terletak pada sumber dukungan kekuasaan pemerintah. Jika pada era Orde Baru, militer menjadi pilar kekuatan otoritarianisme, maka pada era Reformasi, dukungan oligarki partai politik menjadi kunci utama. Akhirnya, koalisi yang dibentuk oleh oligarki partai memperkuat politik kartel, membentuk karakter pemerintahan Jokowi saat ini. (Asrinaldi, dkk. 2022)

Kemunculan wacana Jokowi sebagai sosok yang sangat demokratis dan populis juga ditulis oleh Laurel Richardson, dalam Mietzner (2015) yang melihat bahwa kemunculan Jokowi adalah fenomena baru yang ada dalam lanskap politik Indonesia. Laurel menjelaskan bahwa Dalam dekade awal tahun 2010-an, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam lanskap politiknya. Munculnya Joko Widodo, yang akrab dipanggil Jokowi, sebagai alternatif populis moderat memberikan dimensi baru dalam politik Indonesia. Jokowi tidak hanya mengandalkan popularitas semata, tetapi juga memperkenalkan gaya kepemimpinan yang pragmatis, inklusif, dan teknokratis. Hal ini berbeda dengan gaya populis yang diusung oleh Prabowo Subianto, yang lebih cenderung polarizing dan mengadvokasi perubahan rezim secara komprehensif.

Sebagian besar rakyat Indonesia pada saat itu menginginkan distribusi kekayaan yang lebih adil, terutama hasil dari ledakan sumber daya alam selama periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, survei juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak menginginkan adanya kemunduran demokrasi seperti yang dipropagandakan oleh Prabowo. Sebaliknya, mereka mencari alternatif populis yang berfokus pada efisiensi, bersifat inklusif, dan tetap mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi.

Jokowi muncul sebagai representasi dari apa yang diinginkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia: populisme moderat yang bekerja di dalam sistem yang ada, bukan menentangnya. Gaya kepemimpinan Jokowi, yang dikenal dengan blusukan—kunjungan mendadak ke tempat-tempat

publik seperti pasar dan kantor pemerintahan untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat—menjadi simbol dari keterhubungannya dengan rakyat. Praktik ini tidak hanya meningkatkan popularitasnya tetapi juga membuatnya memenangkan pemilihan ulang dengan 92 persen suara pada tahun 2010.

Namun, Jokowi bukanlah orator ulung seperti para populis klasik lainnya. Gaya komunikasinya yang seringkali sederhana dan kurang retorika justru memperkuat citranya sebagai pemimpin yang merakyat dan tidak berjarak dengan masyarakat. Narasi yang dibawa oleh media nasional semakin memperkuat posisi Jokowi sebagai bintang yang sedang naik daun dalam pemerintahan lokal, hingga akhirnya mencatatkan dirinya sebagai calon favorit dalam pemilihan presiden 2014. Pertarungan antara Prabowo yang konfrontatif dengan Jokowi yang teknokratik dan inklusif menjadi sorotan utama dalam politik Indonesia saat itu. Populisme yang ditawarkan oleh Jokowi berbeda dari yang biasanya, dengan fokus pada pendekatan praktis dan solusi nyata bagi permasalahan masyarakat, yang pada akhirnya membawanya pada kemenangan dalam pemilihan presiden.

Literatur yang ditulis Laurel, dkk dalam Mietzner (2015), sekali lagi menunjukkan bahwa kemunculan Jokowi sebagai pemimpin populis moderat dinilai sebagai fenomena penting dalam memahami dinamika politik Indonesia kontemporer. Gaya kepemimpinan yang menggabungkan populisme dengan teknokrasi dan inklusivitas menciptakan model baru dalam politik Indonesia, yang tidak hanya berhasil menarik dukungan rakyat, tetapi juga mengukuhkan posisi Jokowi sebagai figur sentral dalam politik nasional.

Dalam literatur yang ditulis oleh Laurel, dkk dalam Mietzner (2015), Jokowi digambarkan sebagai sosok yang harus berkompromi dengan partai politik untuk dapat menjadi kandidat calon presiden. Hal itu karena sistem politik di Indonesia tidak memungkinkan calon presiden dari jalur

independen. Di situ lah banyak pengamat politik menilai Jokowi dapat dijadikan alat kekuasaan dari para elit politik. Bagi Jokowi, pilihan untuk mendapatkan kendaraan maju Pilpres dari partai-partai yang sudah mapan yaitu PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Namun, upaya ini tidak mudah, karena Jokowi harus menghadapi intrik partai, penolakan terhadap orang luar, dan tantangan untuk mengamankan dukungan Megawati, yang memiliki pengaruh besar dalam partai.

Strategi Jokowi untuk mendekati Megawati berfokus pada dua hal: mendapatkan kepercayaan pribadi dari Megawati dan melakukan transformasi dirinya dari seorang independen menjadi figur yang dapat diterima sebagai ikon PDIP. Pendekatan ini berhasil, dan Megawati akhirnya mendukung pencalonannya. Namun, langkah ini juga mengundang kritik, karena banyak yang melihatnya sebagai tanda bahwa Jokowi tunduk pada kepentingan elit lama, merusak citranya sebagai populis yang mampu melawan status quo.

Pandangan terhadap pencalonan Jokowi terbagi. Para pengamat teori oligarki berpendapat bahwa Jokowi telah menjadi alat dari elit lama yang memanfaatkan popularitasnya untuk mempertahankan kekuasaan. Di sisi lain, pluralis melihat pencalonan Jokowi sebagai fenomena baru dalam politik Indonesia, di mana untuk pertama kalinya seorang warga kelas menengah memiliki peluang nyata untuk menjadi presiden. Ini menandakan perubahan dalam dinamika politik, di mana Jokowi bisa menjadi agen reformasi atau, sebaliknya, hanya memperkuat status quo. (Laurel, dkk dalam Mietzner, 2015) Dalam artikel tersebut, peneliti dapat memahami bahwa Jokowi terdapat wacana yang diproduksi bahwa Jokowi diidentikan dengan kelompok yang pro demokrasi. Jokowi ditulis oleh Laurel sebagai sosok yang menawarkan agenda populis yang moderat yang mewakili agenda demokratisasi dan peningkatan pelayanan publik.

Laurel menjelaskan bahwa pemilihan presiden Indonesia tahun 2014 menjadi momen penting dalam sejarah politik pasca-reformasi, menghadirkan pilihan yang sangat berbeda bagi pemilih. Tidak seperti pemilu sebelumnya yang lebih banyak didasarkan pada perbedaan kepribadian antara kandidat, pemilu kali ini mempertemukan dua visi yang sangat berbeda mengenai masa depan negara. Prabowo Subianto, dengan platform neo-otoritarian dan ultrapopulismenya, menawarkan perubahan drastis yang berpotensi menggeser Indonesia kembali ke era kekuasaan yang lebih sentralistik dan otoriter. Sebaliknya, Joko Widodo (Jokowi) mewakili kesinambungan demokratisasi dan peningkatan pelayanan publik yang lebih inklusif dan berorientasi pada efisiensi.

Pada akhirnya, mayoritas pemilih menolak agenda populis radikal Prabowo dan memilih Jokowi, yang menawarkan versi populisme yang lebih moderat dan dapat dijalankan dalam kerangka demokrasi yang ada. Namun, kemenangan Jokowi tidak terjadi secara kebetulan; ada empat faktor utama yang memengaruhi hasil akhir ini. Pertama, jaringan relawan Jokowi memainkan peran kunci. Relawan-relawan ini membentuk sebuah gerakan yang hampir menyerupai gerakan populis dalam literatur politik. Jaringan ini memberikan fondasi sosial yang kuat bagi kampanye Jokowi, yang berhasil mengimbangi kelemahan PDIP, partai yang secara formal mendukung pencalonannya. Dukungan dari jaringan relawan ini juga membantu Jokowi untuk membedakan dirinya dari politik partai konvensional, dan menunjukkan bahwa pencalonannya memiliki dukungan nyata dari masyarakat luas.

Kedua, identitas kelas menjadi faktor penentu dalam perilaku pemilih. Masyarakat miskin pedesaan secara besar-besaran mendukung Jokowi karena mereka melihatnya sebagai "orang biasa" yang memiliki gaya hidup sederhana seperti mereka. Sebaliknya, Prabowo berhasil menarik dukungan dari kalangan kelas atas yang sepakat dengan pandangannya bahwa presiden Indonesia

harus memiliki pandangan seorang pemimpin dunia, bukan seorang "anak desa". Jokowi dengan cerdik memainkan perannya sebagai sosok yang dekat dengan rakyat, meyakinkan pemilih bahwa ia adalah seorang pemimpin yang tetap rendah hati dan terhubung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ketiga, dukungan dari beberapa kalangan oligarki juga memainkan peran penting dalam kemenangan Jokowi. Meskipun Prabowo memiliki akses yang kuat ke dukungan finansial dari oligarki, Jokowi juga berhasil mengamankan dukungan dari beberapa kelompok oligarki yang memungkinkan dirinya menyeimbangkan keunggulan Prabowo dalam hal ini. Dukungan ini memberikan Jokowi sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kampanye yang efektif dan menjangkau pemilih di seluruh penjuru negeri.

Keempat, suasana politik yang cenderung stabil juga berkontribusi pada kemenangan Jokowi. Pada saat pemilu, mayoritas pemilih tidak mendukung perubahan rezim yang radikal seperti yang diusulkan oleh Prabowo. Mereka lebih memilih stabilitas dan kesinambungan dalam kerangka demokrasi yang sudah ada, dibandingkan dengan risiko yang dihadirkan oleh agenda populis radikal Prabowo. Sentimen ini mencerminkan kepuasan relatif dengan sistem demokrasi yang, meskipun memiliki kekurangannya, masih dianggap sebagai pilihan terbaik oleh sebagian besar pemilih.

Namun, meskipun Jokowi berhasil memenangkan pemilu, tantangan dari Prabowo tidak bisa diabaikan. Hampir 47 persen pemilih mendukung Prabowo, yang, meskipun memiliki rekam jejak hak asasi manusia yang kontroversial dan agenda anti-demokrasi, tetap mampu menarik dukungan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa populisme radikal dan anti-demokrasi masih memiliki tempat dalam politik Indonesia, dan bahwa kemenangan Jokowi tidak serta merta mengakhiri pengaruh dari kekuatan-kekuatan tersebut. Secara keseluruhan, kemenangan Jokowi

pada pemilu 2014 mencerminkan keberhasilan strategi populisme moderat yang dipadukan dengan pragmatisme politik dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Pascakemenangan Jokowi dalam Pemilu, saat memegang tampuk kekuasaan beberapa pandangan muncul bahwa dalam pemerintahan Jokowi pengaruh oligarki akan tetap kuat. Hal itu tercermin dari banyaknya kompromi elit politik dengan Jokowi yang terjalin. Setelah dilantik, Jokowi menunjukkan sikap yang kuat terhadap nasionalisme ekonomi dengan menegaskan bahwa investasi asing harus memberikan manfaat nyata bagi Indonesia. Sikap ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak bisa dikategorikan sebagai "post-populist," karena nasionalisme ekonomi tetap menjadi bagian penting dari profil politiknya dan resonansi di masyarakat.

Namun, banyak perkembangan setelah pemilu yang memperkuat pandangan bahwa oligarki tetap berperan dalam pemerintahan. Parlemen, dengan kekuatan veto yang dimilikinya, memaksa pemerintahan Jokowi untuk lebih berhati-hati dalam mengajukan undang-undang yang kontroversial. Populisme Jokowi yang inklusif dan tidak konfrontatif bertujuan untuk mempertahankan status quo demokratis, namun sikap ini juga membuatnya rentan terhadap pengaruh oligarki. Meski demikian, pendekatan ini memungkinkan Jokowi untuk melindungi sistem demokrasi dari ancaman perubahan radikal yang diusung oleh Prabowo. (Laurel, dkk dalam Mietzner, 2015)

Maka dari itu, kemenangan Jokowi tidak bisa diartikan sebagai bukti bahwa pendukung reformasi telah sepenuhnya mengendalikan situasi, sama halnya dengan tidak bisa dianggap sebagai kemenangan mutlak oligarki. Pertarungan untuk menguasai hegemoni politik di Indonesia pasca-otoritarianisme masih terus berlanjut. Keberhasilan Jokowi dalam mempertahankan demokrasi hingga saat ini sebagian besar berkat dukungan kelompok masyarakat sipil, pemimpin komunitas, dan aktivis yang telah mendapat manfaat dari bantuan demokrasi internasional selama

lebih dari satu dekade terakhir. Dukungan ini akan sangat penting untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya dalam mempertahankan demokrasi di Indonesia. (Laurel, dkk, 2015). Kita dapat memahami bahwa Laurel dalam literaturnya menekankan, meskipun Jokowi yang dinilai mewakili kepentingan demokrasi pada Pilpres 2014, akan tetapi kelompok reformis dan pro demokrasi tidak memegang sepenuhnya kendali situasi, dan kepentingan oligarki akan tetap berpengaruh dalam pemerintahan. Apa yang ditulis Laurel pada 2015 terkait dengan hal itu setidaknya dapat dikaitkan dengan fenomena hari ini, di mana pada perkembangannya sejak 2016 misalnya Jokowi cenderung lebih mengakomodir kepentingan elit politik seperti mulai mementingkan proyek kereta cepat yang tidak direncanakan sejak awal, hingga pada akhirnya melanggengkan politik dinasti dengan cara berkompromi dengan para elit partai politik. (Majalah Tempo).

Bagaimana populisme Jokowi dapat terjadi dan bertahan di tengah upayanya yang dinilai oleh banyak pihak memundurkan demokrasi? Postill, (2018) misalnya menjelaskan bahwa sosial media memiliki andil terhadap itu. Dalam artikelnya, Postill menjelaskan bahwa Menurut Gerbaudo, lonjakan populisme saat ini disebabkan oleh dua tren global besar: memburuknya kondisi ekonomi bagi banyak orang dan perubahan teknologi cepat yang menciptakan jarak antara masyarakat biasa dan elit. Gerbaudo berpendapat bahwa populisme global saat ini disebabkan oleh kegagalan sistem neoliberal. Namun, Inglehart dan Norris (2016) menambahkan bahwa identitas budaya yang tidak stabil juga berperan besar. Mereka menemukan bahwa ketidakpuasan terhadap perubahan nilai-nilai budaya lebih berpengaruh dibandingkan kekhawatiran ekonomi dalam mendukung partai-partai populis. Gerbaudo juga menyatakan bahwa populisme dari kiri dan kanan memiliki kesamaan dalam menentang *establishment* dan prinsip neoliberal. (Postill, 2018). Pengaruh sosial media terhadap pengetahuan politik individu yang pada akhirnya akan

mempengaruhi munculnya wacana publik juga dikonfirmasi oleh Dadang Sugiana, dkk (2021). Dalam penelitiannya, Dadang, dkk penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial mempengaruhi pengetahuan politik melalui diskusi daring di berbagai platform. Semakin sering mahasiswa menggunakan media sosial untuk berdiskusi tentang politik, semakin tinggi pengetahuan politik mereka.

Studi literatur yang telah ditulis oleh peneliti dalam beberapa paragraf sebelumnya menunjukkan, memang terjadi pergeseran wacana publik dari Jokowi sebagai harapan dan simbol dari demokrasi, menjadi Jokowi sebagai seorang pemimpin yang memundurkan demokrasi. Beberapa akademisi politik bahkan sudah menuliskan potensi Jokowi tidak bertindak mewakili kelompok pro demokrasi yang mendukungnya di Pilpres 2014 karena tindakan Jokowi yang cenderung kompromistik dengan para oligarki politik demi mengamankan kekuasaanya. Lebih lanjut, pergeseran atau transisi wacana Jokowi dalam isu demokrasi selanjutnya dapat diamati sangat jelas pada Majalah Tempo.

2.2 Batasan Majalah Tempo

Peneliti memilih Majalah Tempo sebagai objek utama penelitian karena Majalah Tempo merupakan salah satu produk media yang paling berpengaruh di Indonesia. Secara perusahaan besarnya pengaruh media Tempo dapat dilihat dari pendapatannya yang cukup besar, yakni Rp. 216,8 miliar per 2023 (Tempo, 2023). Salah satu produk digital Tempo, yaitu Podcast Bocor Alus yang ditayangkan pada youtube yang merupakan pembahasan versi lebih singkat sebelum artikel lengkapnya terbit di Majalah Tempo bahkan per Desember 2023 telah ditonton 6,6 juta viewers. (Tempo, 2023). Dari segi akses tempo digital, per tahun 2020 saja, tempo.co (termasuk di dalamnya produk majalah tempo digital), mendapatkan pengunjung lebih dari 52 juta pengunjung.

Pengaruh majalah Tempo dalam konteks sosial - politik Indonesia juga dapat dipahami dari cukup seringnya pejabat pemerintah sekelas menteri di Indonesia yang merasa terganggu dengan pemberitaan Tempo melaporkannya ke Dewan Pers. Beberapa pejabat tersebut antara lain, Kepala Kantor Staf Presiden RI Moeldoko yang melaporkan Majalah Tempo pada Desember 2023 terkait pemberitaan Moeldoko yang diduga membekingi proyek mobil listrik, (antaranews.com, 2023), Menteri Investasi (Kepala BKPM) Bahlil Lahadalia yang melaporkan Majalah Tempo pada Maret 2024 terkait Dugaan permainan izin tambang Bahlil (rmol.id, 2024), dan Menteri BUMN Erick Thohir yang melaporkan Tempo karena keberatan atas pemberitaan tentang manuver Erick melalui PSSI dan BUMN yang tidak disukai PDIP. (cnnindonesia.com, 2023). Peneliti menilai, pengaruh yang cukup kuat Majalah Tempo dalam konteks sosial-politik Indonesia membuat para pejabat publik merasa perlu mengklarifikasi hal yang diberitakan oleh Tempo, karena jika tidak Tempo dinilai mampu menciptakan wacana publik yang negatif bagi mereka.

Guna menjaga fokus dan efektivitas penelitian, peneliti mencoba membatasi periode Majalah Tempo yang akan dijadikan objek penelitian, yakni pada medio 2012 - pertengahan 2024. Tidak semua terbitan Majalah Tempo dijadikan objek analisis, melainkan hanya edisi Majalah Tempo yang memberitakan terkait Jokowi dan isu demokrasi. Sekitar 129 edisi majalah tempo, atau 129 judul dan cover dengan total sekitar 529 lembar halaman yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Dari jumlah tersebut, berdasarkan studi pendahuluan menggunakan analisis monitoring sentimen pemberitaan, setidaknya terdapat 3 kategori yang akan dijabarkan, yaitu 1) Majalah Tempo pada periode 2012-2015 di mana pemberitaan Majalah Tempo terkait Jokowi cenderung sentimennya positif. Jokowi digambarkan sebagai sosok harapan dari demokrasi, politisi yang bertindak berbeda dari politisi lainnya, di mana ia yang lahir dari kalangan masyarakat biasa yang dinilai akan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sipil. Kategori ke-2

yaitu Majalah Tempo pada periode 2016-2020 di mana pemberitaan Majalah Tempo mulai bergeser mempertanyakan kebijakan dan kiprah Jokowi yang mulai mendekati karakter seperti politisi pada umumnya, yaitu lebih mementingkan tujuan elektoral dibandingkan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi seperti janji politiknya. Meskipun demikian, pada kategori ke-2 rata-rata sentimen pemberitaan Majalah Tempo terkait Jokowi cenderung netral, meskipun jumlah sentimen negatifnya meningkat dibandingkan kategori 1. Sementara itu, pada kategori ke-3 yakni pada periode 2021-2024, pemberitaan Majalah Tempo terkait Jokowi dan isu demokrasi didominasi dengan sentimen negatif, di mana Jokowi dianggap sebagai sosok yang merusak demokrasi di Indonesia. Pergeseran wacana pemberitaan media dari Tempo pada periode 2012 - 2024 menarik untuk diteliti karena terjadi pergeseran yang cukup drastis dari memberitakan Jokowi sebagai harapan demokrasi menjadi Jokowi yang diberitakan sebagai penghancur demokrasi dengan sikapnya yang dianggap mengembalikan politik dinasti dan mengintervensi lembaga yudisial melalui iparnya, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman.

Dari batasan tersebut, peneliti menilai penelitian ini dapat menjawab pertanyaan utama penelitian dengan tepat sasaran dan sesuai konteks yang diinginkan dalam kaidah akademik.

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Paradigma Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan paradigma penelitian subjektif. Hal itu karena paradigma subjektif dipandang cocok digunakan ketika penelitian lebih bertujuan dalam rangka memahami makna subjektif dari individu atau kelompok masyarakat dalam konteks sosial dan budaya mereka. Paradigma subjektif dipandang lebih fleksibel dan mampu untuk mengungkap sesuatu yang sifatnya kompleks dan kontekstual. Dasar dari asumsi paradigma subjektif, yaitu kenyataan tidak bersifat objektif dan universal, melainkan sangat dipengaruhi oleh perspektif, pengalaman, atau konteks sosial dari individu atau kelompok yang mengalaminya tersebut. Oleh karena itu, ketika penelitian ini berfokus untuk mengamati perubahan wacana yang diproduksi oleh suatu kelompok sosial, yang dalam hal ini Majalah Tempo yang perubahan itu tidak lepas dari interpretasi insan media terhadap konteks sosial yang terjadi, maka paradigma subjektif menjadi paradigma yang paling relevan untuk digunakan.

"Menurut pandangan subjektif, realitas sosial adalah suatu kondisi yang cair dan mudah berubah melalui interaksi manusia dalam kehidupan sehari - hari. Fenomena sosial senantiasa bersifat sementara, bahkan bersifat polisemik (multimakna) dan tetap diasumsikan demikian hingga terjadi negosiasi berikutnya untuk menetapkan status realitas sosial tersebut. Realitas dianggap nyata sejauh mereka bersepakat bahwa hal itu memang nyata bagi mereka. Untuk itu, orang bertindak berdasarkan makna atau definisi yang mereka berikan kepada lingkungan mereka. Mereka melakukan hal itu lewat simbol-simbol bahasa baik verbal (bahasa) ataupun perilaku nonverbal dalam kehidupan mereka. Manusia aktif menafsirkan lingkungan mereka, mengubahnya bila diperlukan, dan menentukan jalan hidup mereka sendiri, dan melakukan tindakan apa pun dengan cara yang dapat dijelaskan. Jadi manusia pun punya andil dalam pembentukan realitas," (Mulyana, 2018, hal : 69-70)

Paradigma subjektif yang menekankan bahwa realitas sosial adalah hasil dari interaksi-interaksi sosial yang bersifat komunikatif (Jalbert, dalam Deddy Mulyana, 2018) dinilai sangat cocok untuk penelitian ini yang coba memahami bagaimana interaksi - interaksi sosial insan media

dengan masyarakat, dengan tokoh politik, bahkan dengan Jokowi yang mempengaruhi proses penciptaan wacana publik terkait Jokowi dalam isu demokrasi yang pada akhirnya berubah. Pemahaman ini juga berkaitan dengan proses pemaknaan insan media terhadap Jokowi dan masyarakat dalam kontes sosial yang senantiasa berubah. Cairnya pemaknaan atas individu atau kelompok sosial terhadap lingkungannya yang dalam ini konteks sosial masyarakat Indonesia memahami Jokowi dalam isu demokrasi itu lah yang kemudian hanya dapat diulas secara komprehensif menggunakan paradigma subjektif.

"Sebagaimana dikatakan Pace dan Faules, pandangan subjektif menekankan penciptaan makna. Menurut pandangan subjektif, lingkungan dikelola dengan mengelola makna. Bila lingkungan merupakan suatu penciptaan, maka amatlah bijaksana untuk meneliti proses kreatif itu sendiri alih-alih secara total mempercayai gagasan bahwa telah ada suatu "penemuan" lingkungan dan lingkungan itu menunggu untuk dikelola" (Mulyana, 2018. hal : 71)

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai penelitian yang sifatnya memberikan penafsiran (interpretif) dengan melibatkan banyak metode dalam melakukan telaah terhadap penelitiannya. Penggunaan banyak metode tersebut ditujukan agar peneliti mendapatkan pemahaman yang lengkap atau komprehensif dalam rangka mengungkap fenomena yang diteliti. (Mulyana, 2018). Pengamatan mendalam terhadap perilaku, interaksi, atau pengalaman manusia cenderung menjadi hal utama dan ciri khas dalam jenis penelitian kualitatif. Pengamatan yang dilakukan bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti wawancara, observasi, hingga analisis teks. Oleh karena itu, ketika penelitian ini bermaksud untuk mengungkap dan memahami transisi wacana Majalah Tempo terkait Jokowi dalam isu demokrasi, maka jenis penelitian kualitatif lah yang digunakan.

Sesuai dengan prinsip epistemologisnya, peneliti kualitatif lazim menelaah hal-hal yang berada dalam lingkungan alamiahnya, berusaha memahami, atau menafsirkan, fenomena berdasarkan makna-makna yang orang berikan kepada hal-hal tersebut. Secara konvensional

metodologi kualitatif cenderung diasosiasikan dengan keinginan peneliti untuk menelaah makna, konteks, dan suatu pendekatan holistik terhadap fenomena, (Mulyana, 2018. Hal : 7)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan didukung oleh data primer dan data sekunder. Seperti yang dijelaskan oleh Creswell, penelitian kualitatif akan lebih bergantung pada pandangan dari peneliti dan elaborasi antara satu sumber data dengan data lainnya, seperti observasi, validasi dokumen, hingga wawancara langsung.

Writing a methods section for a proposal for qualitative research partly requires educating readers as to intent of qualitative research, mentioning specific designs, carefully reflecting on the role the researcher plays in the study, drawing from an ever-expanding list of types of data sources, using specific protocols for recording data, analyzing the information through multiple steps of analysis, and mentioning approaches for documenting the accuracy - or validity - of the data collected (Creswell, 2014) .

Penelitian tentang analisis transisi wacana Majalah Tempo terkait Jokowi dalam isu demokrasi akan lebih dapat terjawab dan dipahami secara mendalam dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal itu karena penelitian dengan metode kualitatif membutuhkan observasi dari sumber data sekunder (pemberitaan di media, dan lain-lain), hingga wawancara mendalam dengan berbagai aktor yang terlibat.

Lebih lanjut, Richardson dan Adam (2018) mengelaborasi bahwa penelitian kualitatif telah lama menghadapi tantangan dalam hal penerimaan dan pemahaman oleh pembaca, terutama jika dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif sering kali mudah dipahami melalui tabel dan ringkasannya, sementara penelitian kualitatif memerlukan pembacaan yang mendalam karena maknanya terkandung dalam keseluruhan teks. Dalam upaya untuk membuat teks penelitian kualitatif lebih berarti dan berpengaruh, konsep penulisan sebagai metode penyelidikan mulai muncul. Peneliti kualitatif semakin menyadari pentingnya kemampuan menulis yang baik, di mana peneliti sendiri menjadi "instrumen" utama dalam penelitian. Kemampuan peneliti untuk mengamati, mendengarkan, dan berpartisipasi sangat penting, namun

kemampuan untuk mengekspresikan temuan mereka melalui tulisan yang efektif dan bermakna juga menjadi semakin penting.

Bahasa dalam konteks penelitian kualitatif dianggap sebagai kekuatan yang membentuk realitas sosial dan identitas individu. Dengan munculnya postmodernisme dan post-strukturalisme, semua klaim kebenaran dipandang sebagai refleksi dari kepentingan tertentu yang terkait dengan konteks budaya dan politik yang spesifik. Metode tradisional penelitian tidak serta merta ditolak, tetapi justru dibuka untuk kritik dan eksplorasi metode baru yang lebih inklusif. Postmodernisme menawarkan perspektif di mana peneliti kualitatif tidak lagi dituntut untuk menjadi narator yang serba tahu. Sebaliknya, mereka diizinkan untuk mengakui posisi subjektif mereka dalam proses mengetahui dan menceritakan dunia. Ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menyampaikan pengetahuan yang parsial, lokal, dan historis tanpa perlu mengklaim kebenaran universal. (Richardson dan Adam, 2018).

Dalam konteks menganalisis teks maupun video dalam metodologi kualitatif, Anssi dan Johanna (2018) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, terdapat dua jenis bahan empiris yang sering digunakan, yaitu wawancara dan materi "*naturally occurring*" atau alami. Kedua jenis ini memiliki perbedaan yang signifikan. Wawancara adalah metode di mana responden memberikan penjelasan atau pandangan mereka kepada peneliti terkait isu yang sedang diteliti. Fokus penelitian dalam wawancara tidak pada proses wawancaranya, melainkan pada isu-isu yang dibahas selama wawancara. Ini berarti bahwa wawancara berfungsi sebagai jembatan untuk menggali informasi tentang suatu topik dari sudut pandang responden.

Sebaliknya, penelitian yang menggunakan bahan empiris alami lebih langsung berhubungan dengan objek penelitian itu sendiri. Bahan empiris alami bisa berupa rekaman

interaksi sehari-hari atau teks tertulis yang menjadi bahan utama penelitian. Dalam konteks ini, materi tersebut tidak hanya menjadi sumber informasi tetapi juga menjadi objek yang diteliti secara langsung. Misalnya, rekaman percakapan sehari-hari bisa dianalisis untuk memahami pola komunikasi dalam masyarakat tertentu. Wawancara memiliki keunggulan dalam mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, di mana peristiwa masa lalu atau pengalaman di tempat yang jauh bisa dipelajari melalui wawancara dengan orang-orang yang terlibat. Misalnya, wawancara dengan seseorang yang pernah tinggal di suatu tempat jauh dapat memberikan wawasan tentang budaya atau kebiasaan setempat tanpa perlu peneliti pergi ke sana. Selain itu, terdapat juga jenis bahan penelitian yang berada di antara wawancara dan materi alami. Contohnya adalah wawancara informal dalam penelitian etnografi atau diskusi kelompok (focus groups), di mana orang-orang mendeskripsikan praktik dan ide mereka dalam situasi yang lebih alami dibandingkan wawancara formal. (Anssi dan Johanna, 2018)

Dalam analisis teks, peneliti kualitatif sering kali tidak mengikuti protokol yang kaku. Sebaliknya, mereka lebih memilih pendekatan informal dengan membaca dan mengkaji ulang bahan empiris untuk menemukan tema-tema utama. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dunia kultural atau makna-makna yang ada dalam teks tersebut. Pendekatan ini sangat cocok untuk penelitian yang tidak menjadikan analisis teks sebagai fokus utama, melainkan sebagai pelengkap atau tambahan. Semiotika, yang merupakan studi tentang tanda dan simbol, juga memainkan peran penting dalam analisis teks. Salah satu pendekatan yang berkembang dari semiotika adalah analisis naratif, di mana narasi dipelajari dalam konteks interaksi sosial. Fokusnya adalah pada cara cerita diceritakan, bagaimana cerita itu dipengaruhi oleh konteks sosial, dan bagaimana cerita itu sendiri membentuk konteks sosial. (Anssi dan Johanna, 2018)

3.3 Metode Penelitian

Analisis Wacana Kritis menjadi metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dalam kajian wacana, analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*, CDA) menjadi pendekatan yang mendalam untuk memahami hubungan antara bahasa, konteks sosial, dan praktik kekuasaan. CDA bertujuan untuk mengungkap bagaimana bahasa digunakan tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai medium untuk memengaruhi, mengontrol, atau bahkan mempertahankan kekuasaan dalam struktur sosial tertentu (Eriyanto, 2001). Salah satu ciri utama CDA adalah pendekatannya yang berupaya menghubungkan elemen-elemen kebahasaan dalam teks dengan struktur sosial yang lebih luas, seperti ideologi, dominasi, dan ketimpangan kekuasaan. Dengan pendekatan ini, CDA tidak hanya memandang teks sebagai entitas yang berdiri sendiri, tetapi sebagai hasil dari interaksi antara konteks sosial dan produksi diskursus (Van Dijk, dalam Eriyanto, 2001).

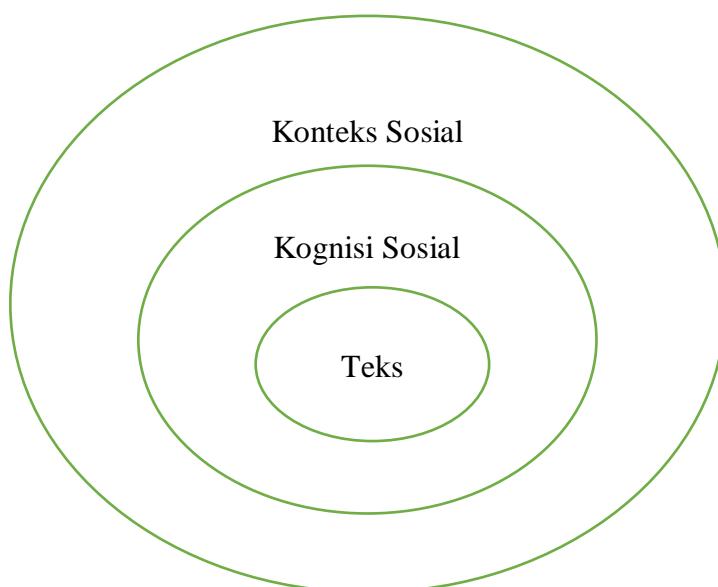
Teori CDA yang berkembang saat ini mencakup berbagai model analisis, salah satunya adalah model yang dikembangkan oleh Teun A. Van Dijk, yaitu **kognisi sosial**. Model ini menekankan bahwa pemahaman terhadap wacana membutuhkan penguraian keterkaitan antara teks sebagai produk linguistik, kognisi sosial sebagai proses mental individu atau kelompok, dan struktur sosial yang menjadi konteks diskursus. Van Dijk menawarkan perspektif yang unik, dengan melihat kognisi sosial sebagai "jembatan" antara struktur mikro, seperti elemen bahasa dan strategi wacana, dengan struktur makro, seperti dominasi sosial dan ideologi. Dalam hal ini, analisis wacana menjadi instrumen untuk mengungkap relasi kekuasaan yang sering kali tersembunyi dalam teks, sehingga memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kelompok sosial tertentu mempertahankan hegemoninya atau mengkonstruksi realitas melalui bahasa (Van Dijk, dalam Eriyanto, 2001).

Lebih lanjut, CDA tidak hanya berfokus pada teks itu sendiri tetapi juga pada bagaimana proses produksi teks melibatkan nilai, ideologi, dan kepentingan kelompok tertentu. Van Dijk, misalnya, menunjukkan bahwa kognisi sosial mencerminkan bagaimana wartawan atau pelaku media dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, yang kemudian diterjemahkan ke dalam teks yang diproduksi. Dengan demikian, wacana tidak hanya menjadi cerminan dari struktur sosial tetapi juga alat untuk menguatkan atau melawan dominasi sosial melalui representasi bahasa yang dipilih secara strategis (Van Dijk, dalam Eriyanto, 2001).

Van Dijk menekankan bahwa wacana mempunyai tiga dimensi atau bangunan, yaitu 1) Teks, 2) Kognisi Sosial, dan 3) Konteks Sosial. Van Dijk menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam suatu analisis untuk dapat melihat suatu wacana yang ada. (Van Dijk, dalam Eriyanto 2001).

Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Sedangkan aspek ketiga mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Analisis Van Dijk di sini menghubungkan analisis tekstual - yang memusatkan perhatian melulu pada teks ke arah analisis yang komprehensif bagaimana teks berita itu diproduksi, baik dalam hubungannya dengan individu wartawan maupun dari masyarakat, (Van Dijk, dalam Eriyanto 2001).

Ketiga dimensi tersebut yang digabungkan oleh Van Dijk untuk dijadikan suatu analisis yang utuh dapat digambarkan menggunakan bagan di bawah ini :



1. Dimensi Teks

Dalam dimensi teks, Van Dijk menjelaskan bahwa terdapat beberapa elemen wacana yang dapat diamati untuk mengetahui elemen wacana apa yang ingin didorong oleh wartawan atau media tersebut. Struktur Wacana tersebut dikategorisasi menjadi Tiga Struktur, yaitu **1) Struktur Makro** yang terdiri dari Tematik di mana peneliti bisa mengamati tema yang dikedepankan dalam suatu berita, **2) Superstruktur** di mana peneliti bisa mengamati skematik atau elemen skema, bagaimana bagian dan urutan berita diskemakan dalam teks berita utuh, dan **3) Struktur Mikro** yang terdiri dari 4 jenis, yaitu **a) Semantik**, di mana peneliti bisa melihat makna yang ingin ditekankan dalam teks berita, misalnya dengan memberi detil pada satu sisi atau membuat eksplisit satu sisi dan mengurangi detil sisi lain melalui pengamatan pada elemen latar, detil maksud, praangapan, dan nominalisasi. **b) Sintaksis**, merupakan struktur mikro di mana peneliti bisa mengamati bagaimana kalimat (bentuk, susunan) yang dipilih wartawan untuk menciptakan wacana. Sintaksis dapat dilihat melalui elemen bentuk kalimat, koherensi, dan kata ganti. **c) Stilistik**, yaitu struktur mikro yang melihat bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita. Stilistik bisa dilihat melalui elemen Leksikon dalam suatu teks berita. **d) Retoris**, merupakan struktur mikro, di mana peneliti bisa melihat bagaimana dan dengan cara penekanan apa dilakukan oleh wartawan untuk menciptakan wacana. Itu bisa dilihat melalui elemen grafis, metafora, dan ekspresi. Untuk rincian struktur wacana analisis teks bisa dilihat dalam tabel berikut :

Struktur Wacana	Hal yang Diamati	Elemen
Struktur Makro	Tematik : Tema atau topik yang dikedepankan dalam suatu berita	1. Topik

Superstruktur	Skematik : Bagaimana bagian dalam urutan berita diskemakan dalam teks berita utuh.	1. Skema
Struktur Mikro	Semantik : Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita.	1. Latar 2. Detil maksud 3. Praanggapan 4. Nominalisasi
Struktur Mikro	Sintaksis : Bagaimana kalimat (bentuk, susunan) yang dipilih	1. Bentuk Kalimat 2. Koherensi 3. Kata Ganti
Struktur Mikro	Stilistik : Bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita.	1. Leksikon
Struktur Mikro	Retoris : Bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan.	1. Grafis 2. Metafora 3. Ekspresi

Tabel Dimensi Teks, (Van Dijk dalam Eriyanto, 2001)

2. Dimensi Kognisi Sosial

Dalam analisis wacana Van Dijk, selain dilihat secara textual, wacana juga harus dipahami dari dimensi kognisi sosial dan juga konteks sosialnya. Hal itu karena struktur wacana dinilai Van

Dijk menunjukkan atau menandakan sejumlah makna, pendapat, dan ideologi. Van Dijk menekankan bahwa wartawan sebagai penulis berita tidak dianggap sebagai individu yang netral, melainkan individu yang memiliki bermacam nilai, pengalaman, dan pengaruh ideologi yang pernah didapatkan dari kehidupannya dan itu mempengaruhi bagaimana dirinya menulis berita. (Van Dijk dalam Eriyanto, 2001).

Lebih lanjut, Van Dijk menjelaskan bagaimana peristiwa dipahami dan dimengerti yang kemudian dijadikan dasar wartawan menuliskan berita didasarkan pada skema atau model. Skema secara konseptual dijelaskan sebagai struktur mental di mana tercakup di dalamnya bagaimana kita memandang manusia, peranan sosial, dan peristiwa. Skema menjadi bahan seorang individu untuk menyeleksi dan memproses informasi yang datang dari lingkungan sekitar. Skema itu membantu manusia atau individu menjelaskan realitas sosial atau dunia yang kompleks. Skema membantu individu menyeleksi mana hal yang harus dipahami, dimaknai, dan ingat. Skema atau model secara singkat dapat dipahami bukan saja sebagai gambaran pengetahuan, melainkan juga pendapat atau penilaian tentang peristiwa. Hal itu kemudian berkorelasi dengan apa yang ditulis inividu atau wartawan terhadap suatu berita. Skema atau model juga berkaitan dengan representasi sosial, sehingga bagaimana pandangan, kepercayaan, dan prasangka yang berkembang dalam masyarakat akan mempengaruhi wartawan, karena wartawan berada di antara pandangan dan keyakinan masyarakat. Dengan demikian, skema atau model bersifat personal dan subjektif. (Van Dijk dalam Eriyanto, 2001).

Setidaknya, Van Dijk mengkategorisasikan skema menjadi 4 jenis, yaitu 1) Skema Person, yaitu skema yang menggambarkan bagaimana seseorang menggambarkan dan memandang orang lain. Bagaimana seorang wartawan Islam, misalnya memandang dan memahami orang Kristen yang kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap berita yang akan dia tulis. 2) Skema Diri,

yaitu berhubungan dengan bagaimana diri sendiri dipandang, dipahami, dan digambarkan oleh seseorang. 3) Skema peran, yaitu berhubungan dengan bagaimana seseorang memandang dan menggambarkan peranan dan posisi yang ditempati seseorang dalam masyarakat. 4) Skema peristiwa, yaitu bagaimana seseorang melihat dan mendengar peristiwa, bagaimana peristiwa ditafsirkan dan dimaknai dalam skema tertentu. (Van Dijk dalam Eriyanto, 2001).

"Analisis kognisi sosial menekankan, bagaimana peristiwa dipahami, didefinisikan, dianalisis, dan ditafsirkan ditampilkan dalam suatu model dan memori. Model ini menggambarkan bagaimana: tindakan atau peristiwa yang dominan, partisipan, waktu, dan lokasi, keadaan, objek yang relevan, atau perangkat tindakan dibentuk dalam struktur berita," (Van Dijk dalam Eriyanto, 2001)

Selain model atau skema, elemen penting yang mempengaruhi kognisi sosial menurut Van Dijk (dalam Eriyanto, 2001), yakni memori. Menurutnya, memori dapat membantu individu untuk berpikir tentang sesuatu dan mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu pula. Memori juga membantu manusia untuk memproses dan mengkategorikan suatu pesan yang membantu manusia melihat suatu realitas. "Yang paling relevan dengan kognisi sosial adalah memori jangka panjang (long-term memory). Memori inilah yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa $2+2 = 4$, bahwa Rendra adalah seorang penyair dan dramawan, bahwa kursi adalah alat untuk duduk, dan sebagainya," (Van Dijk dalam Eriyanto, 2001)

Berdasarkan kognisi sosial atau mental yang ada dalam dirinya, dalam proses produksi berita, setidaknya terdapat beberapa strategi yang digunakan wartawan untuk menyusun berita, yakni :

1. Seleksi, di mana strategi yang digunakan wartawan untuk menunjukkan sumber apa saja, peristiwa dan informasi apa saja diseleksi oleh wartawan untuk ditampilkan ke dalam berita.
2. Reproduksi, strategi di mana informasi digandakan, digandakan sebagian, atau tidak dipakai sama sekali oleh wartawan, strategi ini biasanya berhubungan dengan sumber berita dari kantor berita atau press release.

3. Penyimpulan, strategi yang berkaitan dengan penyimpulan atau peringkasan informasi oleh wartawan. Penyimpulan berkaitan dengan bagaimana realitas yang kompleks dipahami dan ditampilkan dengan diringkas.
4. Transformasi lokal, strategi yang berhubungan dengan bagaimana peristiwa akan ditampilkan, misalnya dengan penambahan informasi tertentu dalam berita oleh wartawan.

Keempat strategi itu di antaranya digunakan oleh wartawan dalam produksi berita dan itu semua terkait dengan kognisi atau mental yang dimiliki oleh wartawan sebagai penulis berita. (Van Dijk dalam Eriyanto, 2001).

3. Dimensi Analisis / Konteks Sosial

Selain dimensi teks dan kognisi sosial, Van Dijk menjelaskan analisis wacana perlu menganalisis konteks sosial atau yang disebut analisis sosial. Menurutnya, wacana adalah bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, untuk meneliti teks, diperlukan analisis intertekstual dengan meneliti bagaimana wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat. Titik tekan dalam dimensi konteks sosial adalah untuk menunjukkan bagaimana makna yang dihayati bersama, kekuasaan sosial diproduksi lewat praktik diskursus dan legitimasi. Setidaknya terdapat dua poin penting untuk melihat konteks sosial, yaitu kekuasaan dan akses. (Van Dijk dalam Eriyanto, 2001)

1) Praktik Kekuasaan.

Van Dijk menggambarkan, bahwa selain berupa kontrol yang bersifat langsung dan fisik, kekuasaan juga dapat dipahami dengan bentuk persuasif, yaitu tindakan seorang untuk secara tidak langsung mengontrol dengan jalan mempengaruhi kondisi mental, seperti kepercayaan, sikap, dan pengetahuan. Kontrol atas pemahaman atau sesuatu dalam suatu kelompok juga dipahami sebagai praktik kekuasaan yang mempengaruhi proses terbentuknya wacana.

2) Akses mempengaruhi wacana

Selain praktik kekuasaan, Van Dijk menekankan bahwa dalam dimensi analisis sosial / konteks sosial, melihat bagaimana akses mempengaruhi wacana menjadi penting. Bagaimana akses di antara masing-masing kelompok dalam masyarakat terhadap wacana dapat dilihat. Biasanya, kelompok elit mempunyai akses yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang tidak berkuasa, sehingga mereka yang lebih berkuasa cenderung lebih memiliki kesempatan lebih besar untuk mempunyai akses kepada media, dan kesempatan lebih besar untuk mempengaruhi kesadaran khalayak. Kelompok yang elit biasanya cenderung lebih bisa memiliki kemampuan untuk menyebarkan press release, atau konferensi pers untuk mempengaruhi wacana di khalayak umum.

Dalam konteks berita sebagai wacana (*News as Discourse*), Van Dijk menekankan bagaimana konteks sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat mempengaruhi proses pembuatan berita. Pendekatan diskursif yang diusulkan Van Dijk mengintegrasikan struktur teks berita dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya dalam proses produksi dan penerimaan berita. Ini tidak hanya memeriksa rutinitas jurnalistik dan kendala produksi media, tetapi juga mengungkap bagaimana proses kognitif dan representasi sosial mempengaruhi cara berita dikonstruksi dan dipahami. Analisis Van Dijk ini menggali penggunaan bahasa, sintaksis, dan pilihan leksikal untuk memahami bagaimana berita dapat menyampaikan opini atau ideologi tertentu. (Van Dijk, 1988). Lebih lanjut, Van Dijk mengeksplorasi peran model kognitif dalam memahami dan menafsirkan berita oleh pembaca. Model-model ini membantu menjelaskan bagaimana pembaca membangun representasi mental mereka tentang peristiwa berita dan bagaimana struktur berita membentuk kerangka interpretasi sosial, politik, dan budaya. Dengan menganalisis berbagai level struktur teks berita, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana komunikasi media

mempengaruhi persepsi dan respons pembaca terhadap berbagai topik. Secara keseluruhan, pemikiran Van Dijk dalam artikelnya "*News as Discourse*" tidak hanya memberikan analisis terperinci tentang struktur berita sebagai diskursus, tetapi juga mengajukan kerangka baru dalam memahami hubungan kompleks antara struktur mikro dan makro dari produksi media. Hal itu juga termasuk dengan bagaimana proses kognitif dan ideologis memainkan peran penting dalam pembentukan realitas media dan interpretasi masyarakat terhadapnya. Dengan demikian, buku ini memberikan kontribusi signifikan dalam literatur mengenai studi media dan komunikasi. (Van Dijk, 1988)

Van Dijk juga menjelaskan bagaimana struktur kekuasaan mempengaruhi struktur wacana yang terbentuk dalam proses penyebarannya melalui media. Dalam artikelnya yang berjudul Structures of Discourse and Structures of Power (1988), Van Dijk menjelaskan bagaimana berbagai sifat utama kekuasaan sosial dan mencoba merekonstruksi sifat-sifat tersebut dalam kerangka teori diskursus. Kekuasaan sosial didefinisikan sebagai properti dari hubungan antara kelompok-kelompok sosial atau formasi sosial lainnya, dan memerlukan kerangka ideologis yang terdiri dari kognisi fundamental yang berbagi secara sosial dan terkait dengan kepentingan kelompok. Kerangka ini diperoleh, dikonfirmasi, atau diubah melalui komunikasi dan diskursus. Kontrol terhadap produksi diskursus adalah kondisi penting untuk pelaksanaan kontrol sosial. Kelompok yang lebih berkuasa memiliki akses dan kontrol terhadap berbagai peran diskursus, genre, kesempatan, dan gaya. Mereka mengontrol dialog formal, memimpin rapat, mengeluarkan perintah atau undang-undang, dan menulis berbagai jenis laporan, buku, dan cerita. Kekuasaan tidak hanya terlihat melalui diskursus tetapi juga sebagai kekuatan masyarakat di balik diskursus, yang merupakan manifestasi langsung dari kekuasaan kelas, kelompok, atau institusi serta posisi atau status relatif anggotanya.

Menurut Van Dijk (1988), media swasta yang bergantung pada iklan berada di bawah kontrol tidak langsung dari klien korporat besar dan aktor berita institusional yang secara teratur memasok informasi. Kelompok-kelompok kekuasaan ini mengontrol berbagai mode distribusi, terutama diskursus media massa, sehingga mengontrol sebagian model pengaruh teks dan pembicaraan publik. Mode produksi artikulasi dikendalikan oleh elit simbolis seperti jurnalis, penulis, seniman, sutradara, akademisi, dan kelompok lain yang menjalankan kekuasaan berdasarkan modal simbolik. Diskursus dan reproduksi ideologis memainkan peran penting dalam pembentukan dan perubahan pemikiran individu. Elit simbolis yang mengontrol gaya dan konten diskursus media dan pendidikan juga memiliki kontrol sebagian atas model pengaruh, dan dengan demikian reproduksi ideologi dalam masyarakat. Teks dan pembicaraan memainkan peran krusial dalam pelaksanaan kekuasaan, baik secara langsung melalui tindakan berbicara yang bersifat memerintah, maupun secara tidak langsung sebagai representasi tindakan dan ideologi aktor kuat.

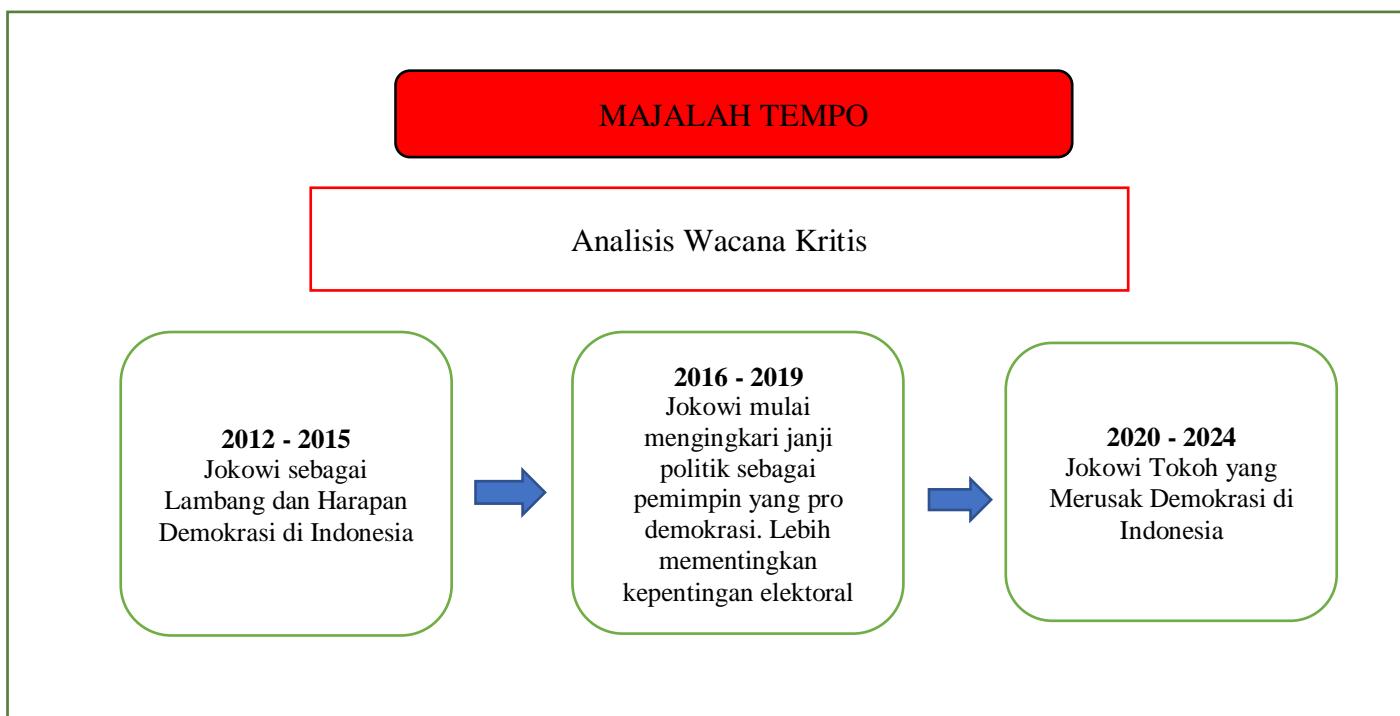
Secara keseluruhan, Van Dijk (1988) ingin menunjukkan bahwa kekuasaan dijalankan dan direproduksi dalam dan oleh diskursus. Tanpa komunikasi - teks dan pembicaraan - kekuasaan dalam masyarakat hampir tidak dapat dijalankan dan dilegitimasi. Kekuasaan membutuhkan pengetahuan, kepercayaan, dan ideologi untuk menopang dan mereproduksinya. Diskursus secara struktural menunjukkan dan mengkomunikasikan kondisi reproduksi penting ini untuk semua tingkat, dimensi, dan konteks masyarakat.

3.4 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada transisi wacana Majalah Tempo tentang Jokowi dalam isu demokrasi. Wacana Majalah Tempo terkait Jokowi dalam isu demokrasi akan dilihat mulai saat ia diperkenalkan ke panggung politik nasional oleh Majalah Tempo pada medio 2012 - 2015. Pada periode tersebut Jokowi diidentikan sebagai simbol dan harapan dari demokrasi. Jokowi

adalah pemimpin yang perlu didukung oleh seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan dipimpin oleh seorang yang berperangai sebagai rakyat "biasa".

Selanjutnya, pada medio 2016-2020. Majalah Tempo mulai memproduksi wacana terkait Jokowi dan demokrasi yang mempertanyakan komitmen Jokowi karena mulai ingkar terhadap janji politiknya di Pilpres 2014. Jokowi mulai melakukan utang-utang luar negeri untuk proyek yang dinilai tidak dibutuhkan rakyat seperti proyek kereta cepat. Tidak hanya itu, Majalah Tempo pun mulai melabeli Jokowi seperti politisi Indonesia pada umumnya yang tidak memiliki komitmen terhadap demokrasi. Bahkan, Jokowi dinilai mulai menghindari kritik karena merangkul Prabowo lawan politiknya dalam kabinetnya di periode pemerintahannya yang kedua. Fase terakhir yaitu 2021 - 2024, Majalah Tempo dengan cukup keras dan konsisten menggambarkan Jokowi sebagai sosok yang menghancurkan demokrasi, mulai dari ketidakcakapan menangani bencana Covid-19 yang menelan banyak korban jiwa, UU Ciptaker yang dinilai hanya menguntungkan kalangan pengusaha, pelemahan KPK, hingga praktik politik dinasti yang dilakukan Jokowi. Secara singkat, fokus penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat melalui model seperti di bawah ini :



Gambar 3.1 (Model Fokus Penelitian)

3.5 Objek Penelitian, Objek, dan Profil Informan

Objek utama dalam penelitian ini yaitu Majalah Tempo pada periode 2012 - 2024 di setiap edisinya yang secara khusus membahas terkait Jokowi dan kaitannya dalam isu demokrasi. Dengan demikian, pusat analisis utama akan ada pada teks berita yang diterbitkan majalah tempo. Selanjutnya, bagaimana pemaknaan penulis berita dan pimpinan redaksi majalah Tempo akan juga dijadikan objek penelitian karena hal itu dinilai berpengaruh terhadap wacana publik yang diproduksi Majalah Tempo terkait Jokowi dalam isu demokrasi. Selain itu, pemahaman terkait konteks sosial politik dan sosial ekonomi juga akan dijadikan objek penelitian, sehingga beberapa pengamat politik, akademisi, dan budayawan akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini.

Dengan demikian, beberapa profil narasumber dalam penelitian ini, antara lain :

1. Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi
2. Koordinator Staf Khusus Presiden AAGN Ari Dwipayana
3. Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit
4. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
5. Aktivis Demokrasi dan Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu
6. Politisi PDI Perjuangan Aria Bima
7. Budayawan sekaligus Pimpinan PT Tempo, Goenawan Moehammad
8. Budayawan Butet Kertaredjasa
9. Budayawan dan akademisi Karlina Supelli
10. Akademisi Yanuar Nugroho (Deputi Kantor Staf Khusus Presiden periode 2014-2019)

11. Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid
12. Pimpinan Redaksi Majalah Tempo
13. Wartawan dan Editor Majalah Tempo pada edisi terkait (2012 - 2024)
14. Pakar Komunikasi Politik Gun Heryanto

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Pengumpulan data utama dalam penelitian ini akan dilakukan melalui metode wawancara.

Hal itu karena proses pengambilan data yang dalam konteks ini dianggap paling relevan dan efektif. Creswell menjelaskan beberapa metode wawancara baik tatap muka secara langsung, maupun menggunakan media telepon. Wawancara dapat menjadi cara yang efektif untuk menggali data, bahkan pertanyaan lanjutan dari pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sebelumnya.

In qualitative interviews, the researcher conducts face to face interviews with participants, telephone interviews, or engages in focus group interviews with six to eight interviewers in each group. These interviews involve unstructured and generally open-ended questions that are few in number and intended to elicit views and opinions from the participants (Creswell, 2014)

2. Dokumen

Selain wawancara, pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah melakukan pengumpulan dokumen baik itu dokumen publik seperti pemberitaan media, brosur atau pamflet kampanye, hingga catatan-catatan dalam pertemuan yang memungkinkan peneliti akses. Dokumen ini akan menguatkan data yang diperoleh dari wawancara sebagai salah satu metode verifikasi lanjutan.

3. Data Audio Visual

Tidak hanya data yang sifatnya berupa dokumen, di samping wawancara penelitian ini juga berusaha mengumpulkan data yang bersifat audio-visual, seperti rekaman suara di radio ataupun video-video yang tersebar baik di media sosial maupun elektronik. Pengumpulan data audio visual akan memperkaya data dalam penelitian ini yang juga akan membantu dalam proses verifikasi data yang ditemukan di lapangan.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan adalah dengan menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi juga dapat dipahami sebagai metode yang digunakan untuk memverifikasi berbagai data yang ditemukan di lapangan dari berbagai sudut pandang, sehingga potensi bias informasi yang didapat dapat diminimalisir. Hal itu akan membantu menjadikan penelitian menghasilkan data yang sifatnya objektif.

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori. (Rahardjo, 2010)

Penelitian ini akan saling melakukan verifikasi dan cek data dari masing-masing sumber informasi yang didapatkan, baik itu wawancara dengan berbagai aktor, dan berbagai jenis dokumen yang didapatkan di lapangan.

E. Daftar Pustaka

Abdalla, Ulil Abshar. (2024, Agustus 22) Demokrasi dan Fluiditas. www.kompas.id : Indonesia. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/08/22/demokrasi-dan-fluiditas> tanggal 12 Februari 2025

Akuntono, Indra. kompas.com edisi 3 Mei 2013 : *Jokowi : Pengusaha Ganjal Relokasi di Waduk Pluit.* Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2013/05/03/11312384/jokowi.pengusaha.ganjal.relokasi.di.waduk.pluit> tanggal 15 Juli 2024.

alinea.id. edisi : Kamis, 14 Maret 2024. '*Karpet Merah' Dinasti Politik Jokowi dalam Pilkada 2024.* Diakses melalui <https://www.alinea.id/politik/karpet-merah-dinasti-politik-jokowi-dalam-pilkada-2024-b2k309PGD> tanggal 15 Oktober 2024.

Anderson, Benedict R. (1990). *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia.* Ithaca: Cornell University Press.

antaranews.com edisi 27 Desember 2023 : *KSP Moeldoko adukan Majalah Tempo ke Dewan Pers.* Diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/3889209/ksp-moeldoko-adukan-majalah-tempo-ke-dewan-pers> tanggal 14 Oktober 2024.

Anugrah, Iqra (2014, Juni 27) Pilpres 2014: Kali Ini, Taruhannya Demokrasi Sob! indoprogress.com : Indonesia. Diakses melalui <https://indoprogress.com/2014/06/pilpres-2014-kali-ini-taruhannya-demokrasi-sob/> tanggal 9 Februari 2025.

Asrinaldi, Yusoff, M. A., & Karim, dan Z. A. (2022). Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislative function in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 7(2), 189–203. <https://doi.org/10.1177/2057891121995564>

Assegaf, Jafar Sodiq. www.solopos.com edisi 16 Oktober 2014 : *Jokowi Presiden : Wajah Jokowi Jadi Sampul Majalah Time.* Diakses melalui <https://news.solopos.com/jokowi-presiden-wajah-jokowi-jadi-sampul-majalah-time-544724> tanggal 19 Juli 2024.

bbc.com (2023, November 10). Jokowi dulu dan sekarang, antara 'harapan dan kenyataan'. bbc.com : Indonesia. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cprxqvwp7ldo> tanggal 11 Februari 2025

bbc.com edisi 14 Maret 2014 : *Jokowi resmi jadi capres PDI Perjuangan.* Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/03/140314_jokowi_capres_pdiperjuangan tanggal 15 Juli 2024

bbc.com edisi 4 Agustus 2011 : *Memimpin Solo ala Jokowi*. Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2011/08/110804_tokohjokowidodo tanggal 14 Juli 2024

Binkley, E. Wilfred. (1952) The President as a National Symbol. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 283, 86-93.

Blumler, J. G., & Kavanagh, D. (1999). *The third age of political communication: Influences and features*. Political communication, 16(3), 209-230.

Chan, J. M., & Lee, C.-C. (1989). *Shifting journalistic paradigms: Editorial stance and political transition in Hong Kong*. *The China Quarterly*, (98), 98–119. <https://doi.org/10.1017/S0305741000023663>

Choir, Alfian Noor. (2023, Agustus 18) Jokowi dan Kostum Raja Jawa Itu. republika.co.id : Indonesia. Diakses melalui <https://www.republika.id/posts/44401/jokowi-dan-kostum-raja-jawa-itu> tanggal 9 Februari 2025.

Chusna, Fitria. kompas.com edisi 21 Juni 2023 : *62 Tahun Jokowi, dari Blusukan ke Gorong - Gorong sampai ke Diplomasi Meja Makan*. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/21/11533491/62-tahun-jokowi-dari-blusukan-ke-gorong-gorong-sampai-ke-diplomasi-meja?page=all> tanggal 15 Juli 2024.

Chusna, Fitria. kompas.com edisi 9 Maret 2023 : *Mereka yang Pernah Bunyikan Isu Pemilu Ditunda, dari Menteri Jokowi hingga Ketum Parpol*. Diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2023/03/09/10244401/mereka-yang-pernah-bunyikan-isu-pemilu-ditunda-dari-menteri-jokowi-hingga?page=all#google_vignette tanggal 30 Juli 2024

cnnindonesia.com edisi 14 Juli 2023 : *Erick Thohir Adukan Podcast Tempo ke Dewan Pers*. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230714001745-12-973284/erick-thohir-adukan-podcast-tempo-ke-dewan-pers> tanggal 15 Oktober 2024.

cnnindonesia.com edisi 14 Juli 2023 : *Survei Indostrategic : Mayoritas Warga Tak Setuju IKN Segera Pindah*. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230714183332-20-973640/survei-indostrategic-majoritas-warga-tak-setuju-ikn-segera-pindah> tanggal 29 Juli 2024.

Creswell, John W. 2014. *Research Design*. California : SAGE Publication

Davis, M. (2007). *Cultural studies: A critical introduction*. Sage Publications.

detik.com edisi 25 April 2022 : *Survei Litbang Kompas Pemerintah Lebih Fokus IKN Dibanding Ekonomi Rakyat*. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-6049820/survei-litbang-kompas-pemerintah-lebih-fokus-ikn-dibanding-ekonomi-rakyat/2> tanggal 29 Juli 2024

detiknews.com edisi 27 Februari 2014 : *Blusukan Jokowi-Ahok, dari Warung Remang - Remang hingga Pasar Ciplak*. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-2510410/blusukan-jokowi-ahok-dari-warung-remang-remang-hingga-pasar-ciplak> tanggal 15 Juli 2024

Dumitrescu, D., & Mughan, A. (2010). *Mass media and democratic politics*. Handbook of politics: State and society in global perspective, 477-491.

Eriyanto, (2001). *Analisis Wacana*. Yogyakarta : LKiS

Gee, James Paul. 1999. *An Introduction to Discourse Analysis, Theory and Method*. London : Routledge.

Geertz, Clifford. (1973). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books.

Gramsci, Antonio. 1971. *Selections from the Prison Notebooks*. New York : International Publisher

Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). Comparing media systems: Three models of media and politics. Cambridge University Press.

Hanitzsch, Thomas, et al. (2011) Mapping Journalism Cultures Across Nations. *Journalism Studies*, 12(3), 273-293. DOI : 10.1080/1461670x.2010.512502

Howarth, David. 1998. *Discourse Theory and Political Analysis*. London : Oxford University Press.

<https://majalah.tempo.co/read/kaleidoskop/170590/dinasti-politik-jokowi> edisi 31 Desember 2023. *Dinasti Jokowi dan Kemunduran Demokrasi*. Diakses tanggal 13 Juli 2024

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cprxqvwp7ldo>. Jokowi Dulu dan Sekarang, antara Harapan dan Kenyataan. diakses tanggal 13 Juli 2024

Inglehart R and Norris P (2016) *Trump, Brexit, and the rise of populism: Economic have-nots and cultural backlash*.

Intyaswati, D., Maryani, E., Sugiana, D., & Venus, A. (2021). *Social Media as an Information Source of Political Learning in Online Education*. SAGE Open, 11(2). <https://doi.org/10.1177/21582440211023181>

Johnson, R. J. (2009) *Ronald Reagan and the Mythology of American History*. (DPhil Thesis : University of Sussex) Sussex Research Online. <http://eprints.sussex.ac.uk/>

Kemp, Kenneth dan Hudlin, Charles. 1992. *Civil Supremacy over the Military : Its Nature and Limits*. Armed Forces and Society vol .19 No. 1. Sage Publication.

Khair, A. Luthfi. (2025, Januari 19) Asal Muasal Istilah 'Raja Jawa' dan Bahayanya bagi Demokrasi Indonesia. [www.theconversation.com](http://www.theconversation.com/asal-muasal-istilah-raja-jawa-dan-bahayanya-bagi-demokrasi-indonesia-247229) : Indonesia. Diakses melalui <https://theconversation.com/asal-muasal-istilah-raja-jawa-dan-bahayanya-bagi-demokrasi-indonesia-247229> tanggal 10 Februari 2025

Kompas.com edisi 13 Juli 2024 : *Anwar Usman Langgar Etik Berat, Pencalonan Gibran Dinilai Cacat Moral.* diakses melalui kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/09/16110101/anwar-usman-langgar-etik-berat-pencalonan-gibran-dinilai-cacat-moral?page=all#> edisi 9 November 2023. Diakses tanggal 13 Juli 2024.

Kompas.com edisi 21 Februari 2022 : *Ragu Hantui Ibu Kota Baru.* Diakses melalui <https://jeo.kompas.com/ragu-hantui-ibu-kota-baru> tanggal 29 Juli 2024

Kristinto, Agung Tri. (2021, April 12) Kepemimpinan dalam Kearifan Masa Lalu. www.kompas.id : Indonesia. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/04/12/kepemimpinan-dalam-kearifan-masa-lalu> tanggal 10 Februari 2025

Kuwado, Januarius Fabian, www.kompas.com edisi 26 Agustus 2014 : *Jokowi Tegaskan Menterinya Tak Boleh Rangkap Jabatan.* Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2014/08/26/13123511/Jokowi.Tegaskan.Menterinya.Tak.Boleh.Rangkap.Jabatan.> tanggal 19 Juli 2024.

Lubis, Lumbanrau Raja Eben. bbc.com (2024, Oktober 16) 'Terima Kasih Jokowi' di medsos hingga tawaran miliaran rupiah ke media - 'operasi manipulasi' atau murni 'cinta jokowi?' [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0kjmdpdr6ro) : indonesia. diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0kjmdpdr6ro> tanggal 13 Februari 2025

Majalah Tempo. Edisi 29 Juli - 4 Agustus 2024 : *Nawadosa Jokowi.*

McCargo, Duncan. (2004). *Comparing media systems: Three models of media and politics.* Cambridge University Press.

Meagher, E. Michael. (1997) In an Atmosphere of National Peril: The Development of John F. Kennedy's World View. *Presidential Studies Quarterly*, 27(3). 467-479

Mietzner, M. (2015). Indonesia in 2014: Jokowi and the Repolarization of Post-Soeharto Politics. *Southeast Asian Affairs*, SEAA15(1), 119–138. <https://doi.org/10.1355/aa15-1g>

Mietzner, M. (2015). Indonesia in 2014: *Jokowi and the Repolarization of Post-Soeharto Politics.* Southeast Asian Affairs, SEAA15(1), 119–138. <https://doi.org/10.1355/aa15-1g>

Mietzner, M. (2015). Reinventing Asian Populism. *Democracy and Political Contestation in Indonesia* <https://www.jstor.org/stable/75711d49-209a-31d5-8926-153ba8d4312a>

Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau*.
Yayasan Obor Indonesia : Jakarta'

Mulyana, Deddy. 2013. *Komunikasi Politik*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Munsatya, Nico dan Novianto, Sendi. (2020) Natural Language Processing untuk Analisis Sentimen Presiden Jokowi Menggunakan Multi Layer Perceptron. Techno.com vol. 19 No. 3 Agustus 2020 : 237-244.

Muttaqin Asfar, Adib. soloPOS.com edisi 8 Januari 2014 : *Pilpres 2014 : Survei Kompas : Elektabilitas Jokowi 43,5%, Prabowo dan Mega Turun*. Diakses melalui <https://news.soloPOS.com/pilpres-2014-survei-kompas-elektabilitas-jokowi-435-prabowo-dan-mega-turun-480421> tanggal 15 Juli 2024

Nisa, Ratih. soloPOS.com edisi 22 Agustus 2020 : *Raih 90% Suara, Jokowi-Rudy Menang Meyakinkan di Pilkada Solo 2010*. Diakses melalui <https://pilkada.soloPOS.com/raih-90-suara-jokowi-rudy-menang-meyakinkan-di-pilkada-solo-2010-1076910> tanggal 14 Juli 2024.

Nugroho, Adityo (2024, Agustus 22) Ucapan Bahlil Akan Diingat Sejarah, Jokowi 'Raja Jawa' yang Bengis. rmol.com : Indonesia. Diakses melalui <https://rmol.id/politik/read/2024/08/22/633866/ucapan-bahlil-akan-diingat-sejarah-jokowi-raja-jawa-yang-bengis> tanggal 9 Februari 2025

Page, B. I. (1996). *The mass media as political actors*. PS: political science & politics, 29(1), 20-24.

Perakyla, Anssi dan Ruusuvuori, Johanna. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research : Analyzing Talk and Text*. London : SAGE Publications.

Postill, J. (2018). Populism and social media: a global perspective. *Media, Culture and Society*, 40(5), 754–765. <https://doi.org/10.1177/0163443718772186>

Rahardjo, Mudija. 2010. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. diakses melalui <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> tanggal 19 Oktober 2020.

Rahayu, Tri. Tribunnews.com edisi 14 Mei 2024 : *Ratusan Baliho Dukungan ke Kapolda Jadi Cagub Bertebaran di Sragen*. Diakses melalui <https://soloraya.soloPOS.com/ratusan-baliho-dukungan-ke-kapolda-jadi-cagub-bertebaran-di-sragen-1921184> tanggal 30 Juli 2024

Ramadhan, Gilang. tirto.id edisi 20 September 2020 : *Putaran Kedua Pilgub DKI 2012 : Titik Balik Popularitas Jokowi*. Diakses melalui <https://tirto.id/putaran-kedua-pilgub-dki-2012-titik-balik-popularitas-jokowi-f4CZ> tanggal 14 Juli 2024.

Richardson, Laurel dan Adams, Elizabeth. (2018) *The SAGE Handbook of Qualitative Research : Writing: A Method of Inquiry..* London : SAGE Publications.

rmol.id edisi : Selasa 5 Maret 2024 : *Bahlil Lahadalia Adukan Tempo ke Dewan Pers*. Diakses melalui <https://rmol.id/politik/read/2024/03/05/611806/bahlil-lahadalia-adukan-tempo-ke-dewan-pers> tanggal 14 Oktober 2024.

Sahide, Ahmad. kompas.id edisi 3 November 2023 : *Jokowi dari Kesempurnaan Demokrasi Menuju Politik Dinasti* diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/01/jokowi-dari-kesempurnaan-demokrasi-menuju-politik-dinasti>

Saputra, Andrian. (2018, November 29) Sukarno Menolak Dijadikan Raja. [www.republika.co.id : Indonesia](https://www.republika.co.id/Indonesia/berita/selarung/suluh/18/11/28/piwg1j282-sukarno-menolak-dijadikan-raja). Diakses melalui <https://www.republika.co.id/Indonesia/berita/selarung/suluh/18/11/28/piwg1j282-sukarno-menolak-dijadikan-raja> tanggal 9 Februari 2025

Schwandt, A. Thomas dan Gates F. Emily (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research : Case Study Methodology*. London : SAGE Publications.

Sindonews.com edisi Selasa, 13 Februari 2024 : *Akademisi Sebut Sistem Demokrasi Indonesia Berada di Persimpangan Jalan*. Diakses melalui <https://nasional.sindonews.com/read/1321755/12/akademisi-sebut-sistem-demokrasi-indonesia-berada-di-persimpangan-jalan-1707926576> tanggal 15 Oktober 2024.

Sitompul, Martin. (2024, Agustus 29) Soeharto Berkuasa Seperti Raja Jawa. [www.historia.id : Indonesia](https://www.historia.id/Indonesia/politik/articles/soeharto-berkuasa-seperti-raja-jawa-DOynx). Diakses melalui <https://www.historia.id/Indonesia/politik/articles/soeharto-berkuasa-seperti-raja-jawa-DOynx>/page/2 tanggal 9 Februari 2025.

Tapsell, R. (2012). *Politics and the Press in Indonesia*. Media Asia, 39(2), 109–116. <https://doi.org/10.1080/01296612.2012.11689925>

Tempo. 2023. *Laporan Tahunan Tempo*. Diakses melalui www.tempo.co.id tanggal 15 Oktober 2024.

tempo.co edisi 24 September 2021 : *2 Tahun Lalu Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK*. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/amp/1510065/2-tahun-lalu-gelombang-unjuk-rasa-mahasiswa-tolak-revisi-uu-kpk> diakses tanggal 28 Juli 2024

Tomisa, D. (2017). *Indonesia in 2016: Jokowi consolidates power*. Southeast Asian Affairs, 2017, 149-162. <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26492599>

tribunnews.com. edisi Jumat, 26 Januari 2024 : *Jokowi Nyatakan Presiden Boleh Memihak dan Kampanye, Prof. Muradi : Merusak Sendi-Sendi Negara*. diakses melalui <https://muria.tribunnews.com/2024/01/26/jokowi-nyatakan-presiden-boleh-memihak-kampanye-prof-muradi-merusak-sendi-sendi-negara> tanggal 15 Oktober 2024.

Van Dijk, Teun. 1988. *News As Discourse*. New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates.

Van Dijk. 2008. *Discourse and Power*. New York : PALGRAVE MACMILLAN

www.bbc.com (2018, Februari, 27) Benarkah SBY adalah 'keturunan raja Majapahit'? Lalu apa maknannya? bbc.com : Indonesia. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43208445> tanggal 10 Februari 2025.

Zhang, W., & Chia, S. C. (2006). *The Effects of Mass Media Use and Social Capital on Civic and Political Participation*. *Communication Studies*, 57(3), 277–297. <https://doi.org/10.1080/10510970600666974>

F. Lampiran